

**PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
KEJELASAN SASARAN ANGGARAN DAN AKTIVITAS PENGENDALIAN
TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA PADA KANTOR WILAYAH
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

**OLEH :
FADHILLAH RAMADHANI
168330115**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2021**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 24/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)24/12/21

**PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
KEJELASAN SASARAN ANGGARAN DAN AKTIVITAS PENGENDALIAN
TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA PADA KANTOR WILAYAH
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

**OLEH :
FADHILLAH RAMADHANI
168330115**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2021**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 24/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)24/12/21

**PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
KEJELASAN SASARAN ANGGARAN DAN AKTIVITAS PENGENDALIAN
TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA PADA KANTOR WILAYAH
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Medan Area



**OLEH :
FADHILLAH RAMADHANI
168330115**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2021**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Aktivitas Pengendalian
Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Sumatera Utara

Nama : **FADHILLAH RAMADHANI**
NPM : 16.833.0115
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Disetujui Oleh :

Komisi Pembimbing


(Dr. Hj. Saribulan Tambunan, SE., MMA)

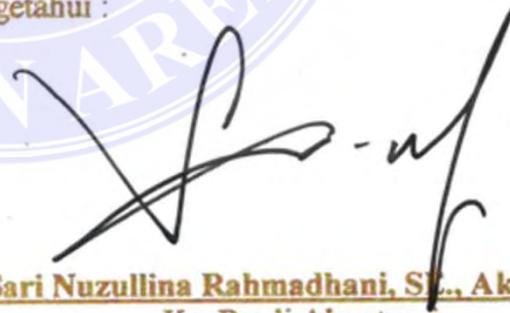
Pembimbing

Mengetahui :



(Teddi Prihadi, SE., MM)

Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik


(Sari Nuzullina Rahmadhani, SE., Ak., M.Acc)
Ka. Prodi Akuntansi

19/04 20

Tanggal/Bulan/Tahun Lulus : 17/November/2020

HALAMAN PERNYATAAN ORIGINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul “**Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara**”, yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 12 Maret 2021
Yang Membuat Pernyataan,



Fadhillah Ramadhani
NPM. 16.833.0115

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fadhillah Ramadhani
NPM : 16.833.0115
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara”**. Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada Tanggal : 12 Maret 2021
Yang menyatakan,



Fadhillah Ramadhani
NPM. 16.833.0115

RIWAYAT HIDUP

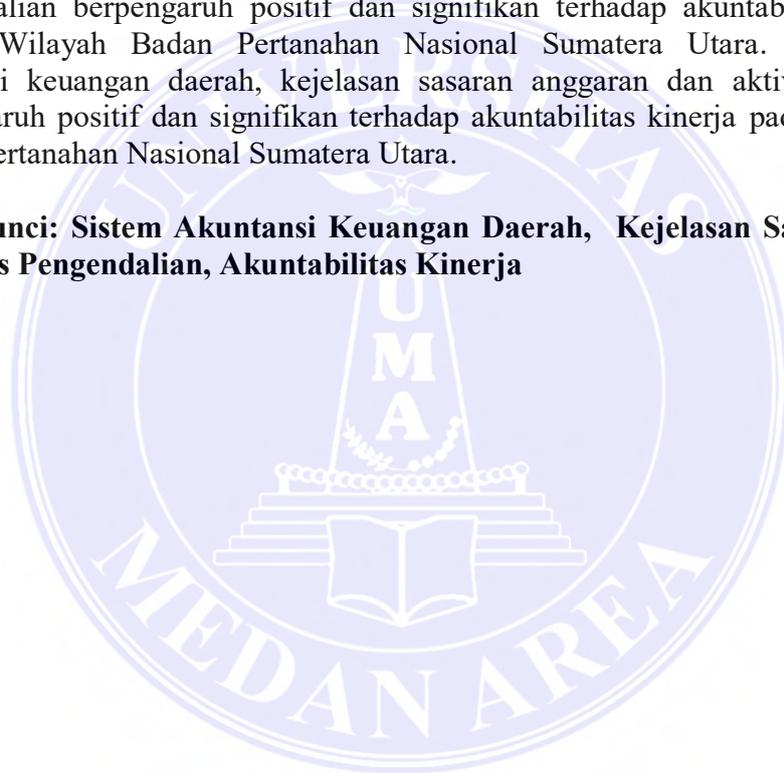
Peneliti dilahirkan di Sei Rampah, Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 06 Januari 1999. Peneliti adalah anak dari Bapak Abdul Rahman dan Ibu Yulistina. Peneliti adalah anak sulung dari dua bersaudara. Tahun 2016 peneliti lulus dari SMA Brigjend Katamso Medan, dan pada tahun 2016 peneliti terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area.



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah kejelasan sasaran anggaran dan aktivitas pengendalian terhadap akuntabilitas kinerja pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara. Jenis Penelitian ini menggunakan asosiatif kausal. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh sumber daya manusia yang berada di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 38 responden. Jenis data yang digunakan adalah kuantitatif. Sumber data dari penelitian ini adalah data primer. Teknik analisis data dalam penelitian ini diolah menggunakan SPSS *Statistics*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja, kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja dan aktivitas pengendalian berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara. Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, kejelasan sasaran anggaran dan aktivitas pengendalian berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara.

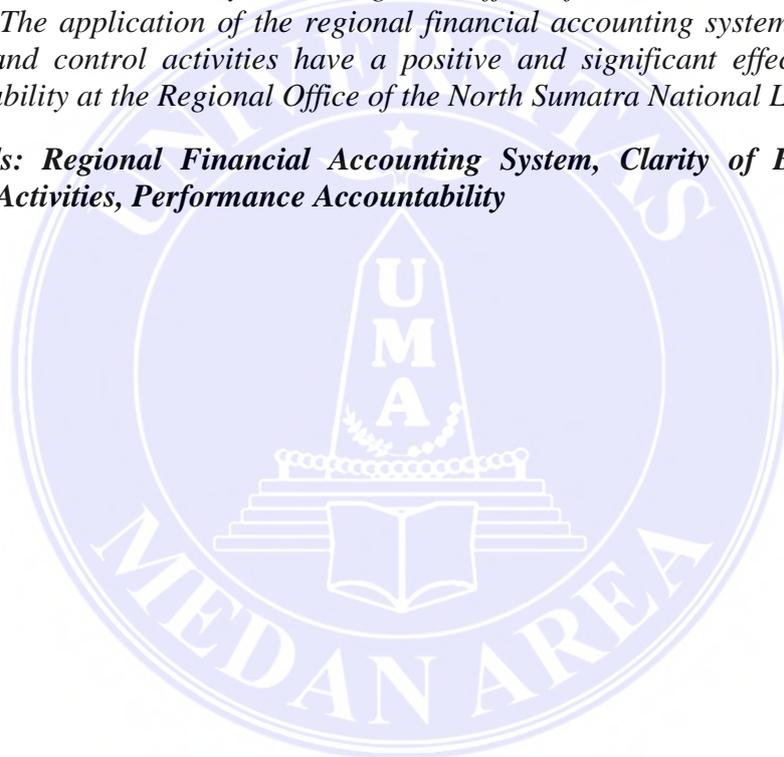
Kata Kunci: Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kejelasan Sasaran Anggaran, Aktivitas Pengendalian, Akuntabilitas Kinerja



ABSTRACT

This study aims to determine the effect of the application of the regional financial accounting system, clarity of budget targets and control activities on performance accountability at the Regional Office of the North Sumatra National Land Agency. This type of research uses associative causal. The population in this study were all human resources in the Regional Office of the North Sumatra National Land Agency. The sample in this study amounted to 38 respondents. The type of data used is quantitative. The data source of this research is primary data. The data analysis technique in this study was processed using SPSS Statistics. The results showed that the application of the regional financial accounting system had a positive and significant effect on performance accountability, clarity of budget targets had a significant positive effect on performance accountability and control activities had a significant positive effect on performance accountability at the Regional Office of the North Sumatra National Land Agency. The application of the regional financial accounting system, clarity of budget targets and control activities have a positive and significant effect on performance accountability at the Regional Office of the North Sumatra National Land Agency.

Keywords: *Regional Financial Accounting System, Clarity of Budget Objectives, Control Activities, Performance Accountability*



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara”** guna memperoleh gelar sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area. Sholawat beriringan salam juga dipersembahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW telah membawa kabar tentang pentingnya ilmu bagi kehidupan di dunia dan di akhirat kelak

Peneliti menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan pada skripsi ini. Oleh karena itu peneliti mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat bermanfaat di bidang akuntansi sektor publik. Peneliti mendapatkan banyak dukungan, doa, serta motivasi dan bantuan baik secara moril maupun materil dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Oleh karena itu, peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

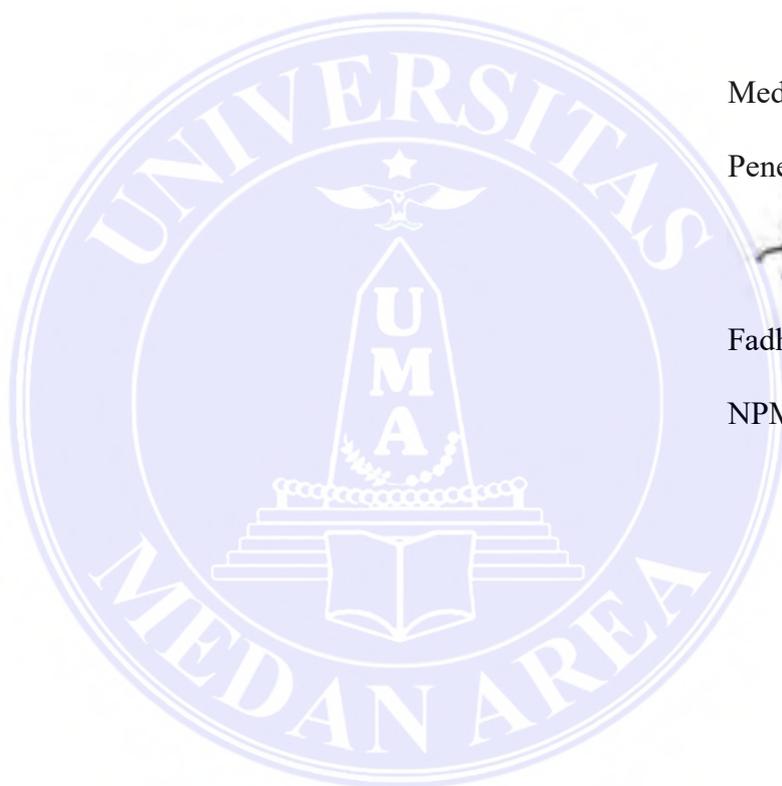
1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Ihsan Effendi, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area.
3. Ibu Sari Nuzullina Rahmadhani, SE, Ak, M.Acc selaku Ketua Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area dan selaku Dosen Sekretaris

yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada peneliti dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Ibu Dr. Hj. Sari Bulan Tambunan, SE, MMA selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu serta memberikan banyak saran, bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Warsani Purnama Sari, SE, Ak, MM selaku Dosen Pembimbing II dan Dosen Penguji yang telah meluangkan waktu serta memberikan banyak saran, bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Dra. Hj. Retnawati Siregar, M.Si selaku Ketua Sidang yang telah meluangkan waktunya serta memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.
7. Teristimewa kedua Orang Tua Bapak Abdul Rahman dan Ibu Yulistina, yang telah banyak berjasa dalam membesarkan peneliti, mensupport semua kebutuhan peneliti, selalu memberikan semangat, dukungan, doa, dan motivasi yang sangat berharga bagi peneliti.
8. Adik terkasih Muhammad Afif Ramadhan, Para Sepupu, Om dan Tante yang selalu memberikan dukungan kepada peneliti.
9. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara atas kesempatan yang diberikan untuk melakukan penelitian untuk bahan skripsi ini. Dan Bapak Wahyu Utomo, Khalid Hakim dan Rahmat Kuswandi yang membantu peneliti melakukan penelitian di lokasi penelitian. Dan semua pihak yang terkait, peneliti tidak mampu membalas kebaikan maupun bantuan yang peneliti terima.
10. Teman-teman terdekat, Ade Hartini, Indah Purnama, Rosi Permata Sari Sembiring dan Winda Widyanti yang selalu ada bagi peneliti. Teman-teman seangkatan, Abd

Hadi, Beby Novia Marsha, City Adhayani, Choirunisa, Muhammad Rinaldi, Siti Zubaidah dan yang lainnya yang telah melewati masa-masa perkuliahan bersama.

Terima kasih atas semua bantuan yang telah diberikan, semoga Allah membalas amal baik saudara/i dan semua pihak yang telah bermurah hati memberikan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi ilmu pengetahuan di bidang sumber daya manusia. Amin ya robbal ,,alamin.



Medan, 12 Maret 2021

Peneliti

Fadhillah Ramadhani

NPM : 168330115

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
RIWAYAT HIDUP	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II : LANDASAN TEORITIS	7
2.1 Teori – Teori	7
2.1.1 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	7
2.1.1.1 Pengertian Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.....	7
2.1.1.2 Tujuan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.....	8
2.1.1.3 Prosedur Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.....	10

2.1.1.4 Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah	10
2.1.1.5 Indikator Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	12
2.1.2 Pengertian dan Ruang Lingkup Keuangan Daerah.....	12
2.1.3 Anggaran Daerah	13
2.1.3.1 Pengertian Anggaran Daerah.....	13
2.1.3.2 Fungsi Anggaran Daerah.....	14
2.1.3.3 Tujuan Anggaran Daerah	15
2.1.3.4 Indikator Kejelasan Sasaran Anggaran	16
2.1.3.5 Target Anggaran Kementerian	17
2.1.4 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	20
2.1.4.1 Pengertian Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	20
2.1.4.2 Tujuan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.....	21
2.1.4.3 Unsur – Unsur Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.....	21
2.1.4.4 Indikator Aktivitas Pengendalian	28
2.1.5 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	28
2.1.5.1 Pengertian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.....	28
2.1.5.2 Tujuan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	29
2.1.5.3 Aspek – Aspek Akuntabilitas	30
2.1.5.4 Indikator Akuntabilitas Kinerja.....	32
2.1.6 Hubungan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dengan Akuntabilitas Kinerja	33

2.1.7 Hubungan Kejelasan Sasaran Anggaran Dengan Akuntabilitas Kinerja	34
2.1.8 Hubungan Aktivitas Pengendalian Dengan Akuntabilitas Kinerja.....	35
2.2 Penelitian Terdahulu	36
2.3 Perbedaan Penelitian	39
2.4 Kerangka Konseptual	39
2.5 Hipotesis	40
BAB III : METODE PENELITIAN.....	41
3.1 Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian	41
3.1.1 Jenis Penelitian	41
3.1.2 Lokasi Penelitian.....	41
3.1.3 Waktu Penelitian.....	41
3.2 Populasi dan Sampel Penelitian	42
3.2.1 Populasi Penelitian.....	42
3.2.2 Sampel Penelitian	42
3.3 Definisi Operasional Variabel	43
3.3.1 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	43
3.3.2 Kejelasan Sasaran Anggaran	44
3.3.3 Aktivitas Pengendalian	44
3.3.4 Akuntabilitas Kinerja.....	45
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	47
3.4.1 Jenis Data.....	47
3.4.2 Sumber Data	48

3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	48
3.6 Teknik Analisis Data.....	49
3.6.1 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas.....	49
3.6.1.1 Uji Validitas	49
3.6.1.2 Uji Reliabilitas.....	49
3.6.2 Uji Asumsi Klasik.....	50
3.6.2.1 Uji Normalitas	50
3.6.2.2 Uji Multikolinearitas	50
3.6.2.3 Uji Heterokedastisitas.....	51
3.6.3 Uji Regresi Linear Berganda	51
3.6.4 Uji Hipotesis	52
3.6.4.1 Uji Parsial (Uji-t).....	52
3.6.4.2 Uji Signifikasi Simultan (Uji F)	53
3.6.4.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	53
BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN.....	55
4.1 Data Penelitian	55
4.1.1 Sejarah Singkat Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara	55
4.1.2 Visi dan Misi Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara	56
4.1.3 Struktur Organisasi	57
4.1.4 Logo, dan Makna Logo.....	63
4.2 Analisis Data	64
4.2.1 Hasil Penelitian	64

4.2.2 Analisis Deskriptif	65
4.2.2.1 Data Responden	65
4.2.2.2 Analisis Deskriptif Variabel.....	66
4.2.3 Analisis Statistik	75
4.2.3.1 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas	75
4.2.3.2 Uji Asumsi Klasik	77
4.2.3.2.1 Uji Normalitas	77
4.2.3.2.2 Uji Multikolinieritas	80
4.2.3.2.3 Uji Heteroskedastisitas	81
4.2.3.3 Uji Regresi Linear Berganda.....	82
4.2.3.4 Uji Hipotesis	84
4.2.3.4.1 Uji Parsial (Uji t)	84
4.2.3.4.2 Uji Simultan (Uji F)	85
4.2.3.4.3 Uji Koefisien Determinasi (R ²).....	86
4.2.4 Hasil Pembahasan Penelitian	87
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	92
5.1 Kesimpulan	92
5.2 Saran	92
DAFTAR PUSTAKA.....	95
LAMPIRAN	98

DAFTAR TABEL

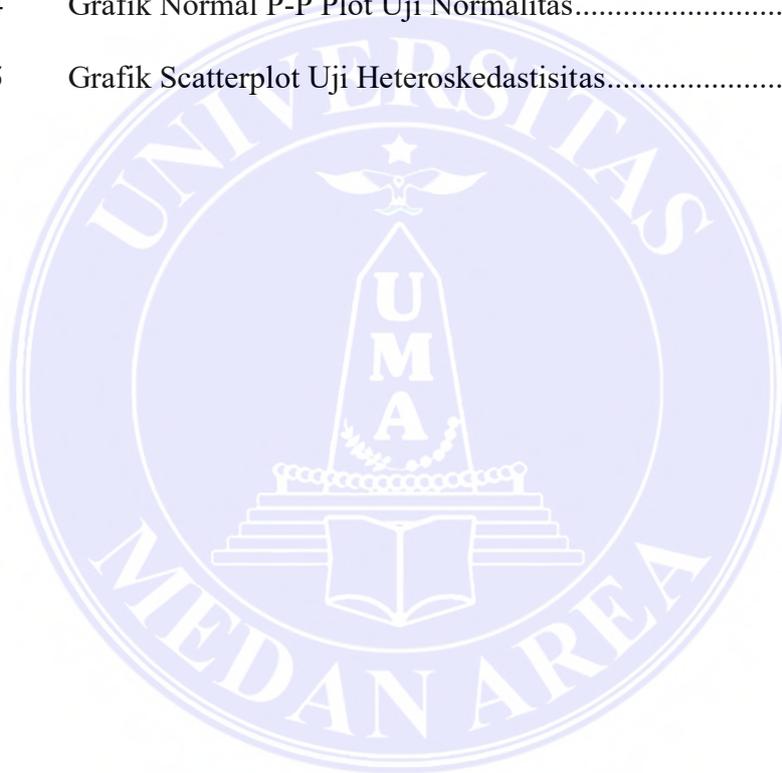
No. Tabel	Judul	Halaman
1.1	Realisasi Anggaran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara	2
2.1	Review Penelitian Terdahulu	36
3.1	Rencana Waktu Penelitian.....	42
3.2	Definisi Operasional Variabel	46
4.1	Pengumpulan Data	65
4.2	Karakteristik Responden	65
4.3	Distribusi Jawaban Responden terhadap Variabel Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X1)	66
4.4	Distribusi Jawaban Responden terhadap Variabel Kejelasan Sasaran Anggaran (X2).....	69
4.5	Distribusi Jawaban Responden terhadap Variabel Aktivitas Pengendalian (X3)	71
4.6	Distribusi Jawaban Responden terhadap Variabel Akuntabilitas Kinerja (Y)	73
4.7	Hasil Uji Validitas	75
4.8	Reliabilitas Data	77
4.9	Uji Kolmogorov-Smirnov	79
4.10	Uji Multikolinearitas	80
4.11	Hasil Uji Glejser.....	82

4.12	Hasil Analisis Regresi Linear Berganda	83
4.13	Hasil Uji Simultan (Uji t)	84
4.14	Hasil Uji Parsial (Uji F)	86
4.15	Hasil Uji Koefisien Determinasi (R ²)	87



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul	Halaman
2.1	Kerangka Konseptual	40
4.1	Struktur Organisasi	58
4.2	Logo Badan Pertanahan Nasional RI.....	63
4.3	Grafik Histogram Uji Normalitas	78
4.4	Grafik Normal P-P Plot Uji Normalitas.....	78
4.5	Grafik Scatterplot Uji Heteroskedastisitas.....	81



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Kuesioner Penelitian	98
Lampiran 2 : Distribusi Jawaban Responden	103
Lampiran 3 : Hasil Uji Statistika	107
Lampiran 4 : Hasil Uji Hipotesis	126
Lampiran 5 : Surat Izin Riset.....	128
Lampiran 6 : Surat Persetujuan Riset	129



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pencapaian akuntabilitas kinerja yang dilakukan instansi pemerintah baik akuntabilitas kejujuran, program, hukum, proses, pelaksanaan dan kebijakan pemerintah sering mendapat perhatian lebih dari masyarakat. Hal ini dapat sejalan dengan sering terjadinya permasalahan korupsi di setiap lingkungan area pemerintah. Dan juga tidak ketinggalan kolusi maupun nepotisme yang juga sering terjadi menjadikan semakin meningkatnya pengawasan dan perhatian masyarakat luas terhadap akuntabilitas kinerja yang dijalankan oleh instansi pemerintah. Di Indonesia, Pemerintah telah berupaya untuk segera mewujudkan pemerintahan yang dapat lebih menjamin adanya keseimbangan dan wujud nyata akuntabilitas kepada masyarakat. Hal tersebut diwujudkan dengan upaya pemerintah mengeluarkan peraturan tentang akuntabilitas.

Akuntabilitas secara eksplisit diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP merupakan serangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah sehubungan dalam penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Sistem inilah yang kemudian menghasilkan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai outputnya.

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara yang merupakan perwakilan instansi pemerintah dibawah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional juga menerapkan peraturan tersebut. Melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) peraturan tersebut diaplikasikan oleh pemerintah untuk dapat dilakukan penilaian setiap tahunnya kepada setiap lingkungan instansi pemerintah demi meningkatkan kinerja pemerintah.

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara untuk laporan kinerja tahun 2018 mendapatkan nilai evaluasi berpredikat “BB” yang memiliki range nilai 72,70. Predikat ini dikategorikan sangat baik, namun tentu saja hasil tersebut masih belum maksimal, karena hasil yang memuaskan adalah mendapat predikat “AA”. Masih ada permasalahan yang membuat pencapaian nilai SAKIP belum mendapatkan nilai yang maksimal yaitu inefisiensi penggunaan anggaran pada instansi pemerintah ini. Adapun laporan realisasi anggaran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.1
Realisasi Anggaran
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara

Tahun	Rencana Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja
2016	Rp. 27.830.556.000	Rp. 21.073.105.101	76 %
2017	Rp. 39.513.957.000	Rp. 24.635.689.923	62 %
2018	Rp. 284.052.600.000	Rp. 242.054.769.365	85 %

Sumber : Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara

Berdasarkan tabel diatas, realisasi anggaran tahun 2017 sebesar 62% mengalami penurunan 14% dari tahun sebelumnya yaitu 2016 sebesar 76%. Namun, di tahun 2018 terjadi kenaikan 23 % dengan capaian realisasi

anggarnya sebesar 85%. Penurunan pada tahun 2016 dapat terjadi dikarenakan masih banyak rencana program kerja yang belum dapat direalisasikan. Hal ini dikarenakan masih kurangnya pemantauan dan pengendalian anggaran yang dilakukan sumber daya manusia dalam pemanfaatan ruang di lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara. Sebagai contoh belum ada sebuah pengaturan mengenai tentang cara untuk melakukan pengawasan, mengevaluasi, dan membuat pelaporan, dan juga belum adanya peraturan untuk menentukan kriteria sebuah permasalahan khusus. Permasalahan Permasalahan tersebut di tahun 2018 berangsur membaik dilihat dari realisasi anggaran yang meningkat dan penilaian akuntabilitas kinerjanya mendapat peringkat BB. Namun, upaya capaian tersebut masih belum optimal terkhusus untuk akuntabilitas kinerja.

Untuk mewujudkan peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan terdapat beberapa faktor, salah satunya adalah dengan menerapkan sistem akuntansi keuangan daerah. Dengan adanya penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan yang dihasilkan terintegrasi dan lebih jelas penggunaan anggaran dan mudah dipahami serta dapat dibuktikan pertanggungjawabannya. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara menggunakan sistem akuntansi keuangan Online Monitoring SPAN, Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA), Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) dan Sistem Informasi PNPB Online (SIMPONI). Dengan begitu, rencana strategik dari instansi pemerintahan akan tercapai sesuai awal perjanjian kinerja dan nilai akuntabilitas kinerja memuaskan.

Demi menyelenggarakan instansi pemerintah yang akuntabel tidak lepas dari anggaran pemerintah. Kenis (1979) dalam Pratama (2019) mengatakan terdapat beberapa karakteristik sistem penganggaran. Salah satu ciri anggaran adalah adanya kejelasan target anggaran, adanya target anggaran yang jelas akan memudahkan individu dalam menyusun target anggaran. Adapun program anggaran di Kanwil Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara antara lain pelaksanaan penataan agraria daerah, pengadaan tanah di daerah, pengembangan struktur agraria daerah dan lain sebagainya. Jika program anggaran memiliki tujuan dan sasaran yang jelas sesuai dengan rencana kerja. Kemudian instansi akan meningkatkan akuntabilitas kinerja dengan hasil yang memuaskan.

Selain itu, perlu juga diterapkannya aktivitas pengendalian untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan. Agar memudahkan organisasi untuk memantau suatu organisasi dalam menjalankan setiap kegiatannya. Pengendalian sangat diperlukan untuk memastikan setiap kegiatan dan anggaran yang keluar dapat berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya telah direncanakan sehingga tujuan anggaran dapat tercapai sesuai yang diinginkan. Masih banyak kelemahan dalam sistem pengendalian internal dalam instansi pemerintahan. Hal itu bisa dilihat dari kurang dipahaminya tugas pokok dan fungsi pada satuan kerja serta kurang tertibnya penyusunan dan penerapan kebijakan dan tentu akan berdampak pada akuntabilitas kinerja.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Aktivitas Pengendalian Terhadap**

Akuntabilitas Kinerja Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara ?
2. Apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara ?
3. Apakah aktivitas pengendalian berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara ?
4. Apakah Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, kejelasan sasaran anggaran dan aktivitas pengendalian berpengaruh secara simultan (bersamaan) terhadap akuntabilitas kinerja pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap akuntabilitas kinerja pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara.

3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh aktivitas pengendalian terhadap akuntabilitas kinerja pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara.
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, kejelasan sasaran anggaran dan aktivitas pengendalian terhadap akuntabilitas kinerja pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara secara bersamaan (simultan).

1.4 Manfaat Penelitian

Pada hakikatnya suatu penelitian yang dilaksanakan oleh seseorang diharapkan akan mendapatkan manfaat tertentu. Begitu pula dengan penelitian ini diharapkan mendatangkan manfaat:

1. **Bagi Peneliti**, diharapkan untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, kejelasan sasaran anggaran dan aktivitas pengendalian terhadap akuntabilitas kinerja di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara
2. **Bagi Pemerintah**, dari penelitian ini diharapkan sebagai masukan dan sumber informasi untuk optimalisasi akuntabilitas kinerja yang diharapkan berdampak positif pada kemajuan instansi pemerintah di masa yang akan datang.
3. **Bagi Akademisi**, diharapkan penelitian ini dapat memperkaya bahan kepustakaan dan Universitas Medan Area mampu memberikan kontribusi pada pengembangan teori, terutama yang berkaitan dengan akuntansi, khususnya untuk memahami akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

2.1 Teori – Teori

2.1.1 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

2.1.1.1 Pengertian Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Halim (2013) menyatakan “akuntansi keuangan daerah merupakan proses mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan transaksi ekonomi dari suatu provinsi, kabupaten dan kota yang digunakan sebagai informasi dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang membutuhkan”. Menurut Mahmudi (2011) “Sistem Akuntansi Keuangan Daerah merupakan rangkaian prosedur manual dan terkomputerisasi mulai dari pendataan, peringkasan hingga pelaporan posisi keuangan dan operasional keuangan pemerintah daerah”.

Sistem akuntansi keuangan daerah menurut Permendagri No. 13 tahun 2006 meliputi serangkaian prosedur, mulai dari proses mengumpulkan data, mencatat, mengklasifikasikan dan meringkas transaksi atau peristiwa keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban APBD. APBD yang dapat dibuat secara manual atau menggunakan aplikasi Komputer. Dengan menggunakan sistem akuntansi, risiko kesalahan dan kesalahan dapat diminimalkan dalam pencatatan atau penghitungan yang memungkinkan pemerintah daerah mengalami risiko yang lebih berat.

Dari penuturan para ahli diatas, dapat ditarik kesimpulan sistem akuntansi keuangan daerah adalah suatu kumpulan prosedur pengumpulan data, pencatatan, pengidentifikasian, pengukuran dan pelaporan atas transaksi atau kejadian

keuangan yang dapat dilakukan secara manual ataupun terkomputerisasi dari instansi pemerintah itu sendiri dalam rangka pertanggungjawaban anggaran.

2.1.1.2 Tujuan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Erlina (2008), laporan keuangan pemerintah daerah merupakan hasil akhir dari sistem akuntansi keuangan daerah. Laporan keuangan adalah laporan terstruktur perihal laporan posisi keuangan dan transaksi yang dilakukan oleh entitas pelapor. Akuntansi keuangan daerah bertujuan untuk menyuguhkan informasi perihal laporan posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan performa kinerja keuangan suatu entitas pelapor yang berguna bagi pengguna dalam mengambil dan menilai keputusan perihal alokasi sumber daya. Secara spesifik, pelaporan keuangan pemerintah bertujuan untuk menyuguhkan informasi yang berguna untuk mengambil keputusan dan untuk memperlihatkan akuntabilitas entitas pelapor atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Laporan keuangan pemerintah harus memberikan informasi yang berguna bagi pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan tentang keputusan ekonomi, sosial dan politik dengan:

1. Memberikan informasi perihal kecukupan pendapatan pada masa yang berlaku untuk menutupi semua biaya.
2. Memberikan informasi berkaitan dengan kecocokan cara memperoleh sumber daya ekonomi dan peruntukannya dengan anggaran dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan.
3. Memberikan informasi perihal besaran sumber daya ekonomi yang diperoleh dalam aktivitas entitas pelapor dan hasil yang telah dicapai.

4. Memberikan informasi perihal cara entitas pelapor mendanai semua aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.
5. Memberikan informasi perihal posisi dan keadaan keuangan entitas pelapor berkaitan dengan asal pendapatan, baik jangka pendek maupun panjang, termasuk yang berasal dari pemungutan pajak dan pinjaman.
6. Memberikan informasi perihal perubahan posisi keuangan entitas pelapor, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai dampak dari aktivitas yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan tersebut, laporan keuangan memberikan informasi perihal pengeluaran, pendapatan, transfer, pembiayaan, dana cadangan, aset, kewajiban, dana ekuitas dan arus kas entitas pelapor.

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) tujuan akuntansi keuangan daerah adalah sebagai berikut:

1. Untuk memberikan informasi yang relevan tentang posisi keuangan dan semua transaksi yang dilaksanakan oleh entitas pelapor sepanjang satu periode pelaporan.
2. Untuk memberikan informasi perihal sumber, distribusi dan penggunaan sumber daya keuangan.
3. Memberikan informasi perihal kecukupan pendapatan periode berjalan untuk mendanai semua biaya.
4. Memberikan informasi berkaitan besaran sumber daya ekonomi yang dilaksanakan dalam aktivitas entitas pelapor dan hasil yang telah diraih.
5. Memberikan informasi perihal cara entitas pelapor membiayai semua aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;

6. Memberikan informasi perihal posisi dan kondisi keuangan entitas pelapor sehubungan dengan sumber pendapatan, baik jangka pendek maupun panjang, termasuk yang berasal dari pemungutan pajak dan pinjaman.

2.1.1.3 Prosedur Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Prosedur sistem akuntansi keuangan daerah menurut Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 meliputi:

1. Prosedur akuntansi penerimaan kas, terdiri dari rangkaian metode termasuk pencatatan, peringkasan, dan pelaporan keuangan yang berhubungan dengan penerimaan kas dalam rangka mempertanggungjawabkan realisasi APBD.
2. Prosedur akuntansi pengeluaran kas, terdiri dari rangkaian metode termasuk pencatatan, peringkasan, dan pelaporan keuangan yang berhubungan dengan pengeluaran kas dalam rangka mempertanggungjawabkan realisasi APBD.
3. Prosedur akuntansi untuk aset tetap / properti daerah, termasuk pencatatan dan pelaporan akuntansi untuk akuisisi, pemeliharaan, perubahan klasifikasi, rehabilitasi dan penyusutan aset tetap yang dimiliki / digunakan oleh OPD.
4. Prosedur akuntansi non kas, yang terdiri dari rangkaian metode termasuk pencatatan, peringkasan, dan pelaporan keuangan mengenai seluruh transaksi atau peristiwa selain kas yang dapat dilakukan selain kas.

2.1.1.4 Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Nordiawan (2010) “efektivitas memperlihatkan berhasil tidaknya perolehan tujuan suatu aktivitas / kebijakan dimana tingkatan efektivitas merupakan cerminan dari keluaran”. Efektivitas berkaitan dengan ikatan antara hasil yang diinginkan dan hasil yang benar-benar diraih. Efektivitas adalah bersangkutan antara keluaran dan tujuan. Semakin tinggi partisipasi keluaran

untuk pencapaian tujuan, semakin efektif dan efisien organisasi, program atau kegiatan tersebut.

Dalam hal implementasi kewenangan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang merujuk dengan proporsi keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. akumulasi hak daerah yang dapat dinilai dengan uang sehingga perlu dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah, dan dikeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pengelolaan keuangan daerah dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan ini juga didukung dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah. Permendagri 13/2006 menjelaskan bahwa tujuan pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut:

- a. Bertanggung jawab
- b. Mampu Memenuhi Kewajiban Finansial
- c. Kejujuran
- d. Hasil Penggunaan dan Tujuan
- e. Kontrol

2.1.1.5 Indikator Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Indikator sistem akuntansi keuangan daerah menurut Cahyati (2016) yang juga diambil dari penelitian sebelumnya yaitu Fikri (2015). Indikator sistem akuntansi keuangan didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Indikatornya adalah sebagai berikut:

1. Kesesuaian sistem akuntansi keuangan yang digunakan sudah memenuhi standar akuntansi pemerintahan.
2. Pembuatan laporan keuangan dan di laporkan secara periodik.
3. Prosedur pencatatan transaksi dilakukan berdasarkan standar pencatatan akuntansi pada umumnya.

2.1.2 Pengertian dan Ruang Lingkup Keuangan Daerah

Dalam Halim (2013) “Keuangan negara/daerah adalah semua hak dan kewajiban negara/daerah yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik yang berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dimaksud” (Sugijanto dkk., 1995). Hak – hak negara/daerah adalah segala hak atau usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mengisi kas negara/daerah, misalnya hak menarik pajak dan restribusi serta mengadakan pinjaman. Kewajiban negara/daerah adalah kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakan tugas negara, sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), serta UU APBN/APBD yang pada prinsipnya adalah untuk menyejahterakan rakyat, melayani masyarakat umum, dan sebagai aparat pembangunan (*agent of development*).

Menurut Halim (2013) ruang lingkup keuangan negara/daerah dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu :

- a. Yang dikelola langsung oleh pemerintah, keuangan negara yang dioperasikan langsung oleh pemerintah pusat adalah elemen keuangan negara yang meliputi semua pendapatan dan pengeluaran yang tertera dalam APBN dan barang persediaan milik negara. Sementara itu, keuangan negara yang diurus langsung oleh pemerintah daerah adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah yang tertera dalam APBD dan barang inventaris milik daerah.
- b. Pengelolaan yang dipisahkan, pengelolaan keuangan negara / daerah yang dipisahkan merupakan elemen keuangan negara / daerah yang pemerosesannya dipisahkan dan tata cara pemerosesannya berdasarkan hukum publik ataupun perdata. Keuangan negara / daerah yang dipisahkan ini melibatkan BUMN / BUMD yang dapat berupa badan usaha resmi, perusahaan publik, perusahaan korporasi, bank pemerintah, dan lembaga keuangan pemerintah.

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan keuangan daerah/negara adalah seluruh hak dan kewajiban yang dilakukan oleh negara/daerah dalam rangka mengisi kas negara/daerah dan meyelenggarakan tugas negara yang dapat dinilai dengan uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara.

2.1.3 Anggaran Daerah

2.1.3.1 Pengertian Anggaran Daerah

Anggaran memiliki peranan penting dalam organisasi sektor publik, terutama organisasi pemerintah. Terdapat beberapa definisi anggaran yang dikemukakan oleh beberapa penulis. Dalam Halim (2013), Mardiasmo (2009) menyatakan “anggaran adalah penjelasan perihal perkiraan kinerja yang akan dicapai selama rentang waktu tertentu yang diakui dalam istilah keuangan”. “Anggaran adalah rancangan kegiatan yang diwujudkan dalam bentuk keuangan, termasuk pengeluaran yang diusulkan yang diperkirakan untuk suatu rentang

waktu, serta saran cara untuk memenuhi pengeluaran tersebut (Sugijanto et al., 1995).”

Menurut Bastian (2006) dalam Halim (2013) “anggaran merupakan paket penjelasan estimasi pendapatan dan belanja yang diharapkan terjadi dalam satu atau beberapa masa yang akan datang”. Dari ketiga definisi tersebut Halim (2013) menyimpulkan bahwa “anggaran adalah dokumen yang berisi perkiraan kinerja, baik dalam bentuk pendapatan maupun belanja, yang disuguhkan dalam ukuran finansial yang akan diraih dalam kurun waktu tertentu dan mencakup data masa lalu sebagai bentuk kontrol dan penilaian kinerja.”

Dari penuturan para ahli diatas, dapat ditarik kesimpulan anggaran adalah kumpulan alokasi dokumen pernyataan tentang perkiraan/estimasi penerimaan dan pengeluaran yang ingin daerah itu capai selama periode tertentu.

2.1.3.2 Fungsi Anggaran Daerah

Mardiasmo (2009) dalam Halim (2013) mengidentifikasi beberapa fungsi anggaran dalam sektor publik adalah sebagai berikut

a. Sebagai instrumen perencanaan

Anggaran adalah instrumen perencanaan untuk mendapat sasaran organisasi agar organisasi mengetahui apa yang harus dikerjakan dan petunjuk kebijakan yang harus diambil. Anggaran sektor publik dibentuk untuk menyusun tindakan apa yang akan dibuat pemerintah, berapa biayanya, dan hasil apa yang akan diraih dari pengeluaran tersebut.

b. Sebagai instrumen kontrol

Anggaran sebagai instrumen kontrol untuk menghindari belanja berlebihan, pengeluaran kurang, penyalahgunaan, atau pengeluaran yang salah. Anggaran merupakan instrumen untuk kondisi keuangan dan pelaksanaan program operasional pemerintah.

c. Sebagai instrumen kebijakan

Melalui anggaran, organisasi sektor publik dapat menetapkan tujuan kebijakan tertentu. Anggaran sebagai instrumen kebijakan fiskal pemerintah digunakan untuk menguatkan perekonomian dan merangsang pertumbuhan ekonomi. Melalui anggaran sektor publik, tujuan kebijakan fiskal pemerintah dapat diketahui sehingga dapat dibuat prediksi ekonomi.

d. Sebagai instrumen politik

Anggaran merupakan dokumen politik menjadi wujud komitmen eksekutif dan persetujuan legislatif tentang penggunaan dana masyarakat untuk keperluan tertentu. Anggaran digunakan untuk menentukan prioritas dan keperluan keuangan dari prioritas tertentu. Anggaran bukan hanya masalah teknis, ini membutuhkan keterampilan politik, pembentukan koalisi, keterampilan negosiasi, dan pemahaman perihal manajemen keuangan sektor publik yang memadai oleh manajer publik. Karenanya, kegagalan anggaran akan menggerogoti kepemimpinan dan kredibilitas pemerintah.

e. Sebagai instrumen koordinasi dan komunikasi

Dengan dokumen anggaran yang lengkap, suatu divisi atau unit kerja ataupun departemen yang merupakan sub organisasi bisa mengerti apa yang harus dikerjakan dan apa yang akan dikerjakan unit / unit kerja lain. Oleh sebab itu, anggaran bisa dimanfaatkan sebagai sarana koordinasi dan komunikasi antara dan semua bagian pemerintahan.

f. Sebagai instrumen penilaian kinerja

Kinerja eksekutif diukur berdasarkan perolehan target anggaran, efektivitas dan efisiensi perwujudan anggaran. Kinerja manajer publik diukur berdasarkan performa yang diraih terkait dengan anggaran yang sudah ditetapkan. Anggaran adalah alat yang efektif untuk mengontrol dan menilai kinerja.

g. Sebagai instrumen motivasi

Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajer dan stafnya agar bekerja secara ekonomis, efektif dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang ditetapkan. Untuk memotivasi karyawan, anggaran harus menantang tetapi dapat dicapai atau menuntut tetapi dapat dicapai. Intinya, target anggaran jangan terlalu tinggi sehingga tidak bisa dipenuhi, tapi jangan terlalu rendah sehingga terlalu mudah dicapai.

h. Sebagai instrumen untuk menciptakan ruang publik

Masyarakat dan elemen masyarakat nonpemerintah lainnya, seperti LSM, perguruan tinggi dan lainnya harus dilibatkan dalam proses penganggaran publik. Keterlibatan langsung masyarakat dalam proses penganggaran dapat dilakukan mulai dari proses penyusunan rencana pembangunan dan rencana kerja pemerintah (daerah), masyarakat juga dapat melakukan pelibatan secara tidak langsung melalui wakilnya di lembaga legislatif (DPR / DPRD).

2.1.3.3 Tujuan Anggaran Daerah

Anggaran sektor publik adalah untuk memperoleh sasaran dalam bentuk memberikan layanan kepada masyarakat / masyarakat yang tujuannya untuk mengembangkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat (Halim, 2013).

Ada empat tujuan proses penganggaran menurut Mardiasmo (2002), yaitu:

1. Menyokong pemerintah dalam meraih tujuan fiskal dan mengembangkan koordinasi antarbagian kawasan pemerintahan.
2. Menyokong terciptanya efisiensi dan pemerataan dalam penyediaan barang dan jasa publik melalui proses prioritisasi.
3. Mengharuskan pemerintah memenuhi prioritas pengeluaran
4. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah kepada DPR / DPRD dan masyarakat luas.

Sedangkan tujuan anggaran menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah sebagai berikut:

1. Sebagai penjelasan kebijakan publik.
2. Sebagai objek fiskal yang melambangkan keseimbangan yang diinginkan antara pengeluaran, pendapatan, dan pembiayaan.
3. Memberikan dasar pengendalian yang berakibat hukum.
4. Memberikan dasar untuk mengevaluasi kinerja pemerintah.
5. Sebagai pernyataan tanggung jawab pemerintah kepada publik.

2.1.3.4 Indikator Kejelasan Sasaran Anggaran

Kejelasan sasaran anggaran merupakan salah satu ciri sistem penganggaran yang menunjukkan sejauh mana arah anggaran secara jelas dan spesifik ditetapkan dengan maksud agar anggaran dapat dipahami oleh penanggung jawab pencapaian tersebut (Mardiasmo, 2009). Indikator yang digunakan dalam mengukur kejelasan sasaran anggaran diadopsi dari Silalahi (2017) yang juga diambil dari penelitian sebelumnya yaitu Locke dan Latham (1984: 27), sehingga dalam pengukuran sasaran yang efektif terdapat 7 indikator yang dibutuhkan:

1. Tujuan, membuat secara rinci rencana umum tugas-tugas yang harus dilakukan

2. Kinerja, menetapkan kinerja dalam wujud pertanyaan yang diukur
3. Standar, menetapkan standar atau sasaran yang ingin diraih
4. Jangka Waktu, menetapkan tenggat waktu yang diperlukan untuk pengerjaan
5. Sasaran Prioritas, menetapkan target yang prioritas
6. Tingkat Kesulitan, menetapkan target sesuai tingkat kesulitan dan pentingnya
7. Koordinasi, kebutuhan dalam bekerjasama.

2.1.3.5 Target Anggaran Kementerian

Tujuan Utama target anggaran kementerian adalah bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Untuk mewujudkan itu ada beberapa sasaran strategis yang ingin dicapai yaitu :

a. Sasaran Strategis 1:

Terciptanya Organisasi yang Adaptif dan Akuntabel, adapun indikator sasaran strategis 1 ini meliputi :

1. Terlaksananya kegiatan operasional dan pelayanan kementerian atr/bpn berjalan lancar dan aman.
2. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
3. Pengembangan sarana dan prasarana

b. Sasaran Strategis 2:

Meningkatnya Kapasitas Letak dan Batas Bidang Tanah dan Kepastian Angka Luas nya yang Mendukung Proses Penegakan Hukum, adapun indikator sasaran strategis 2 ini meliputi :

1. Persentase cakupan bidang tanah yang terpetakan
2. Terlaksananya pengembangan infrastruktur di daerah
3. Peta dasar pertanahan skala 1:2.500 (Ha)
4. Tersedianya peta tematik

c. Sasaran Strategis 3:

Terwujudnya Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat Penerima Redistribusi dan Legalisasi Asset, adapun indikator sasaran strategis 3 ini meliputi :

1. Persentase tanah dan ruang yang terdaftar
2. Terlaksananya penataan hubungan hukum agraria di daerah
3. Mewujudkan sertifikat hak atas tanah Prona
4. Sertifikat hak atas tanah untuk UKM, Pertanian dan Nelayan
5. Sertifikasi BMN berupa tanah dan jalanan nasional (s/d 25.000 M²)
6. Sertifikasi BMN berupa tanah dan jalanan nasional (25.000 M²s/d 100.000 M²)

d. Sasaran Strategis 4:

Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pengaturan dan Penataan, Penguasaan, Pemilikan Tanah Serta Pemanfaatan dan Penggunaan Tanah Secara Optimal, adapun indikator sasaran strategis 4 ini meliputi :

1. Hasil pencapaian pembenahan ulang kesenjangan penguasaan pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.
2. Dilakukannya pembenahan agraria di daerah
3. IP4T dan Redistribusi
4. Penyusunan obyek konsolidasi tanah
5. Laporan inventarisasi wilayah pesisir
6. Neraca penatagunaan tanah revisi kategori III

e. Sasaran Strategis 5:

Terwujudnya Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, adapun indikator sasaran strategis 5 ini meliputi :

1. Tersedianya tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum
2. Terlaksananya pengadaan tanah di daerah
3. Pembuatan peta zona nilai tanah 1:10.000
4. Pembuatan peta zona nilai ekonomi kawasan
5. Pembaharuan peta zona nilai tanah
- f. Sasaran Strategis 6 :

Tertib Pemanfaatan Hak Atas Tanah dan Pendayagunaan Tanah Hak, adapun indikator sasaran strategis 6 ini meliputi :

1. Jumlah rekomendasi hasil pengendalian dan pemantauan pertanahan
2. Terlaksananya pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah di daerah
3. Penyelenggaraan pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah di daerah
4. Laporan hasil pemantauan lapangan dalam rangka inventarisasi tanah terindikasi terlantar di kantor pertanahan

g. Sasaran Strategis 7:

Tertib Pemanfaatan Hak Atas Tanah dan Pendayagunaan Tanah Hak. adapun indikator sasaran strategis 7 ini meliputi :

1. Berkurangnya sengketa konflik dan perkara pertanahan
2. Penyelesaian sengketa, konflik dan perkara
3. Terlaksananya penanganan masalah agraria dan tata ruang di daerah
4. Mediasi dan fasilitasi potensi sengketa, konflik tanah dan ruang
5. Penanganan sengketa dan konflik tanah dan ruang
6. Penanganan perkara TUN

7. Penanganan perkara perdata

2.1.4 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

2.1.4.1 Pengertian Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Menurut Mahmudi (2011) Sistem pengendalian internal merupakan proses lengkap dari tindakan dan aktivitas yang dilaksanakan secara terus menerus oleh atasan dan seluruh karyawan untuk menyerahkan kepercayaan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi dengan kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan keadaan aset, dan kepatuhan pada hukum dan peraturan. Sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) merupakan bagian lengkap dari sistem akuntansi pemerintahan. Instansi pemerintah harus mendirikan dan memiliki sistem pengendalian internal yang baik.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menyatakan bahwa: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang dilaksanakan secara komprehensif di lingkungan pemerintah pusat dan daerah. "

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menyatakan bahwa : "Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran."

Berdasarkan definisi diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa Sistem Pengendalian Internal Pemerintah adalah suatu sistem aktivitas pengendalian yang

diselenggarakan diseluruh lingkungan pemerintah pusat dan daerah secara terus menerus terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran agar tujuan organisasi dapat tercapai.

2.1.4.2 Tujuan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Tujuan dibangunnya sistem pengendalian internal menurut Mahmudi (2011) adalah untuk :

1. Menjaga aset negara, baik aset benda maupun data.
2. Menjaga catatan dan dokumen terperinci dan saksama.
3. Membuat informasi keuangan yang saksama, relevan dan dapat diandalkan.
4. Memberikan jaminan yang akseptabel bahwa laporan keuangan pemerintah sudah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku (Standar Akuntansi Pemerintahan / SAP).
5. Mengembangkan efisiensi dan efektivitas operasi organisasi.
6. Memastikan kepatuhan terhadap kebijakan manajemen dan peraturan perundangan yang berlaku.

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sendiri memiliki tujuan untuk mencapai kegiatan pemerintahan yang efektif dan efisien, perlindungan aset negara, keterandalan laporan keuangan dan kepatuhan pada perundang-undangan dan peraturan serta kebijakan yang berlaku.

2.1.4.3 Unsur – Unsur Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Pada tahun 2008 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian pemerintah. Ada lima unsur sistem pengendalian intern yang sebagaimana diatur dalam PP No. 60 Tahun 2008 yaitu :

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian merupakan unsur terpenting yang mendasari elemen lain dari sistem kendali. Lingkungan pengendalian berkaitan dengan moralitas, orang, kejujuran, integritas, dan kompetensi. Komitmen, peran, dan

keteladanan menjadi sangat penting untuk prinsip pengendalian. Oleh sebab itu, pemimpin instansi pemerintah dan para pegawai harus membuat dan memelihara lingkungan di setiap organisasi yang menciptakan perilaku yang positif dan suportif terhadap pengendalian dan pengelolaan internal yang sehat melalui:

1.1 Pengutan integrasi dan nilai etika

Pengutan integrasi dan nilai etika sekurang-kurangnya dilakukan dengan:

- a. Mengembangkan dan melaksanakan aturan perilaku;
- b. Memberikan acuan perilaku pada setiap level atasan Instansi Pemerintah;
- c. Menerapkan langkah disipliner yang sesuai untuk ketidakpatuhan dari kebijakan dan prosedur, atau kesalahan terhadap aturan perilaku;
- d. Merasionalisasi dan mempertanggungjawabkan intervensi atau mengabaikan intervensi; dan
- e. Hapus kebijakan atau tugas yang dapat merangsang perilaku tidak etis.

1.2 Komitmen terhadap kompetensi

Komitmen terhadap kompetensi sekurang-kurangnya dilakukan dengan:

- a. Mengidentifikasi dan menentukan aktivitas yang diperlukan untuk menjalankan tugas dan fungsi masing-masing jabatan di instansi pemerintah.
- b. Menyusun standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada setiap jabatan di instansi pemerintah.
- c. Menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan untuk membantu karyawan mempertahankan dan meningkatkan kompetensi kerja.
- d. Pilih pemimpin lembaga pemerintah yang memiliki keterampilan manajerial dan pengalaman teknis yang luas dalam mengelola lembaga pemerintah.

1.3 Kepemimpinan yang kondusif

Kepemimpinan yang kondusif sekurang-kurangnya ditunjukkan dengan:

- a. Mengkaji risiko dalam pengambilan sikap;
- b. Memakai manajemen berlandas kinerja;
- c. Mendukung fungsi tertentu dalam pelaksanaan SPIP;
- d. Menjaga aset dan informasi dari akses dan penggunaan yang tidak sah;
- e. Berinteraksi secara intensif dengan pejabat di tingkat yang lebih rendah; dan
- f. Menanggapi secara positif laporan yang berkaitan dengan keuangan, penganggaran, program dan kegiatan.

1.4 Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan

Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan sekurang-kurangnya dilakukan dengan:

- a. Mencocokkan dengan bentuk dan sifat aktivitas instansi pemerintah.
- b. Memberikan kepastian kewenangan dan kewajiban pada instansi pemerintah.
- c. Memberikan kepastian hubungan dan tingkat pelaporan internal dalam lembaga pemerintah.
- d. Melakukan pengkajian dan penyesuaian berkala terhadap struktur organisasi perihal perubahan lingkungan strategis.
- e. Tentukan jumlah karyawan yang sesuai, terutama untuk posisi kepemimpinan.

1.5 Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab

Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat sekurang-kurangnya dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kewenangan diserahkan kepada karyawan cocok dengan tingkat tanggung jawabnya untuk meraihi sasaran instansi pemerintah.
- b. Karyawan yang berwenang mengerti bahwa otoritas dan tanggung jawab yang diberikan terkait dengan pihak lain di instansi pemerintah terkait.
- c. Pegawai yang diserahkan otoritas dan tanggung jawab terkait dengan pelaksanaan SPIP.

1.6 Penyusunan dan penerapan kebijakan Sumber Daya Manusia

Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia dilaksanakan dengan memperhatikan sekurang - kurangnya hal-hal sebagai berikut:

- a. Penentuan kebijakan dan metode sejak penerimaan sampai dengan pemberhentian karyawan.
- b. Pelacakan latar belakang calon karyawan dalam proses penerimaan.
- c. Pengawasan periodik yang memadai terhadap pegawai.

1.7 Perwujudan peran aparat pengawasan internal

Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif sekurang kurangnya harus :

- a. Memberikan keseriusan yang penuh atas disiplin, keekonomisan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian sasaran pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah
- b. Memberikan teguran awal dan menumbuhkan efektivitas manajemen risiko dalam pengaturan dalam tugas dan fungsi instansi pemerintah.
- c. Mengelola dan menumbukan nilai tata kelola pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

1.8 Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait

Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait diwujudkan dengan adanya mekanisme saling uji antar instansi pemerintah terkait.

2. Penilaian Risiko

Pengendalian intern harus memberikan penilaian atas resiko yang dihadapi unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam. Penilaian risiko terdiri atas :

- a. Identifikasi risiko
- b. Analisis risiko

3. Aktivitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian menolong meyakinkan bahwa pengarahan atasan instansi pemerintah dilakukan. Aktivitas pengendalian harus efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan organisasi. Aktivitas pengendalian antara lain meliputi :

- a. Evaluasi atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan.
- b. Pengutan sumber daya manusia.
- c. Pengendalian atas pemerosesan sistem informasi.
- d. Pengendalian fisik atas aset.
- e. Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja.
- f. Pemisahan fungsi.
- g. Wewenang atas transaksi dan insiden yang penting.
- h. Pencatatan yang cermat dan tepat waktu atas transaksi dan insiden.
- i. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya
- j. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya
- k. Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting.

Aktivitas pengendalian terdiri atas dua bentuk, yaitu pengendalian umum dan pengendalian aplikasi.

Pengendalian Umum

Pengendalian Umum terdiri atas :

- a. Pengamanan sistem informasi
- b. Pengendalian atas akses
- c. Pengendalian atas pengembangan dan perubahan perangkat lunak aplikasi
- d. Pengendalian atas perangkat lunak sistem
- e. Pemisahan tugas
- f. Kontinuitas pelayanan

Pengendalian Aplikasi

Pengendalian Aplikasi terdiri atas :

- a. Pengendalian otoritas
- b. Pengendalian kelengkapan
- c. Pengendalian akurasi
- d. Pengendalian terhadap keandalan pemrosesan dan file data

4. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi pada dasarnya merupakan pendukung dari unsur sistem pengendalian internal lainnya. Inti dari informasi dan komunikasi adalah manajemen dan karyawan dapat memperoleh informasi dan dapat berkomunikasi dengan atasan dan atau rekan kerjanya yang memungkinkan mereka memahami tugas dan tanggungjawab pengendalian secara baik.

Selain itu informasi dan komunikasi diperlukan untuk memastikan bahwa komplain dari pelanggan segera diinformasikan dan dikomunikasikan ke

pimpinan serta direspon dengan cepat. Pimpinan (manajemen) di semua level wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat serta efektif. Untuk melakukan komunikasi yang efektif, pimpinan harus sedikitnya :

- a. Mempersiapkan dan menggunakan berbagai wujud dan sarana komunikasi.
- b. Selalu memproses, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi.

5. Pemantauan

Pemantauan harus bisa mengukur tingkat kinerja dari setiap waktu dan menyakinkan bahwa pertimbangan hasil audit dan review lainnya bisa segera ditindaklanjuti. Kepala instansi pemerintah diwajibkan untuk memantau sistem pengendalian internal. Penerapan sistem pengendalian internal dilakukan melalui pengawasan berkelanjutan, analisis terpisah, dan pertimbangan tindak lanjut atas hasil audit dan review lainnya.

Pemantauan terus menerus dilakukan melalui aktivitas pengendalian rutin, pengawasan, perbandingan, rekonsiliasi, dan cara lain yang terkait dengan penerapan tugas. Analisis terpisah dilaksanakan dengan evaluasi sendiri, penelaahan, dan pengecekan efektivitas sistem pengendalian internal. Penilaian tersendiri dapat dilaksanakan oleh aparat pengawas internal pemerintah atau pihak eksternal pemerintah. Cakupan dan frekuensi pengendalian internal harus memadai untuk lembaga pemerintah. Rekomendasi tindak lanjut untuk hasil audit dan review lainnya harus segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan untuk menyelesaikan hasil audit dan review lainnya.

2.1.4.4 Indikator Aktivitas Pengendalian

Mardiasmo (2009) menjelaskan, aktivitas pengendalian merupakan kebijakan, prosedur, teknik, dan mekanisme yang digunakan untuk menjamin arahan manajemen telah dilaksanakan. Indikator dalam mengukur aktivitas pengendalian ini diadopsi dari Cahyati (2016) yang juga diambil dari penelitian terdahulu yaitu dikutip dari Iskandar (2014), yaitu :

1. Harus sesuai Prinsip Akuntansi
2. Perekrutan dan Pengembangan SDM
3. Tugas Prosedur dalam Pekerjaan
4. Kesesuaian
5. Pemisahan Tugas
6. Independen

2.1.5 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

2.1.5.1 Pengertian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Akbar dan Nurbaya (2000) dalam Halim (2013) “akuntabilitas mempunyai arti “pertanggungjawaban yang merupakan salah satu ciri dari terapan “good governance” atau pengelolaan pemerintah yang baik dimana pemikiran tersebut bersumber dari pemikiran bahwa pengelolaan administrasi publik merupakan isu utama dalam pencapaian menuju “clean government” atau pemerintahan yang bersih”.

Dalam Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menjelaskan bahwa Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi

dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Sebagai pemegang amanah rakyat, pemerintah tampak serius dan peduli terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas kinerja juga dituangkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menguraikan bahwa akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan /kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Maka dapat disimpulkan bahwa sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah serangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah sehubungan dalam penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

2.1.5.2 Tujuan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Tujuan penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sedangkan

sasaran yang ingin dicapai dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tersebut antara lain :

- a. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
- b. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah
- c. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional.
- d. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan untuk menghasilkan laporan kinerja sesuai dengan ketentuan perundangan dan dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan peyelenggaraan sistem akuntansi pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

2.1.5.3 Aspek – Aspek Akuntabilitas

Akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri atas beberapa aspek. Aspek – aspek akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh lembaga – lembaga publik dalam Mahmudi (2011) antara lain :

- a. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

Akuntabilitas hukum dan kejujuran merupakan pertanggungjawaban lembaga publik untuk bersikap jujur dalam tugas dan mematuhi ketetapan hukum yang berlaku. Penggunaan dana masyarakat harus dilakukan dengan benar dan memiliki kewenangan. Akuntabilitas hukum bersangkut paut dengan ketaatan terhadap undang-undang dan peraturan lainnya yang

diperlukan dalam menggerakkan organisasi, sementara itu akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan kekuasaan, korupsi dan kolusi. Akuntabilitas hukum menuntut penegakan hukum, sedangkan akuntabilitas kejujuran menuntut praktik organisasi yang sehat sehingga tidak terjadi malpraktek dan maladministrasi serta tidak melakukan kebohongan publik.

b. Akuntabilitas Manajerial

Akuntabilitas manajerial merupakan tanggung jawab lembaga publik untuk melaksanakan pengelolaan organisasi secara ekonomis, efisien dan efektif. Akuntabilitas manajerial juga dapat diartikan sebagai akuntabilitas kinerja. Inefisiensi organisasi publik merupakan tanggung jawab lembaga yang bersangkutan dan tidak boleh ditanggung oleh klien atau pelanggannya.

c. Akuntabilitas Program

Lembaga publik wajib mempertanggungjawabkan program yang sudah dibentuk sampai dengan pengoperasian program. Akuntabilitas program artinya program-program organisasi haruslah program-program yang bermutu bermanfaat bagi masyarakat, bukan sekadar program pengeluaran anggaran yang tidak jelas.

d. Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas kebijakan berkaitan dengan akuntabilitas lembaga publik atas kebijakan yang dicapai. Lembaga publik harus bisa mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak negatif yang ditimbulkan. Dalam pengambilan kebijakan harus diperhatikan apa yang menjadi tujuan kebijakan, mengapa

kebijakan diambil, siapa sasarannya, stakeholders mana saja yang akan mendapatkan keuntungan dan kerugian dari kebijakan tersebut, langkah apa yang disiapkan untuk mengantisipasi dampak negatif jika timbul.

e. Akuntabilitas Finansial

Akuntabilitas keuangan merupakan tanggung jawab lembaga publik untuk menggunakan uang rakyat (uang rakyat) secara ekonomis, efisien dan efektif, tanpa pemborosan dan kebocoran dana dan korupsi. Akuntabilitas keuangan menekankan pada anggaran dan ukuran keuangan. Akuntabilitas keuangan sangat penting karena pengelolaan keuangan publik menjadi perhatian utama masyarakat

2.1.5.4 Indikator Akuntabilitas Kinerja

Indikator yang digunakan diadopsi dari Reyhan (2017) yang juga diambil dari penelitian terdahulu yaitu dikutip Mardiasmo (2006:21), yaitu Untuk mengukur variabel ini digunakan indikator berupa :

1. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum, merupakan pelaporan untuk mengurangi tingkat ketidakpastian yang berkaitan dengan suatu masalah yang dihadapi pengambil keputusan.
2. Akuntabilitas Proses, merupakan pelaksanaan kegiatan yang ditentukan dengan menggunakan proses, prosedur dan ukuran – ukuran.
3. Akuntabilitas Pelaksanaan, merupakan pengamatan untuk melihat apakah kegiatan yang dilakukan sudah efisien dan efektif.
4. Akuntabilitas Program, merupakan penetapan dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

5. Akuntabilitas Kebijakan, merupakan pemilihan berbagai kebijakan yang akan diterapkan.

2.1.6 Hubungan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dengan Akuntabilitas Kinerja

Dalam mengatur keuangan daerah, dibutuhkan pengatryan sistem akuntansi untuk mengaontrol penyebaran dana anggaran dan juga bisa dipertanggungjawabkan untuk pelaporan kepada masyarakat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, sasaran pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk memberikan informasi yang berguna bagi pemakai informasi dalam mengukur akuntabilitas dan pengambilan keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik. Untuk mewujudkan tujuan sasaran pelaporan keuangan, perlu diterapkan sistem akuntansi keuangan daerah.

Sistem akuntansi keuangan daerah merupakan sistem akuntansi yang terdiri dari prosedur pencatatan, pengklasifikasian, penafsiran, peringkasan transaksi atau peristiwa keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan anggaran. Tujuan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah adalah untuk mewujudkan fungsi analisis transaksi hingga pelaporan keuangan di lingkungan pemerintahan dimana laporan keuangan pada akhirnya dapat menjadi informasi untuk mengukur dan menilai kinerja pemerintah guna menggambarkan keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraannya. kinerja.

Adanya penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah menjadi sarana yang dapat membantu pemerintahan dalam mewujudkan akuntabilitas kerjanya. Dalam Erlina (2008) output yang dihasilkan dari penerapan sistem akuntansi keuangan daerah adalah laporan keuangan. Laporan keuangan adalah sasaran

akuntabilitas, laporan keuangan yang disuguhkan berlandaskan peraturan yang tertera mencakup pendapatan, penyimpanan, dan belanja uang oleh instansi pemerintah. Pemerintah mempunyai keharusan untuk mempublikasikan akuntabilitas kinerjanya terhadap masyarakat. Segala aktivitas yang menyangkut penggunaan anggaran dan penerimaan negara dapat diatur dengan menerapkan sistem akuntansi keuangan daerah. Bila sistem akuntansi keuangan daerah itu sudah ditetapkan dengan bagus dalam instansi pemerintah. Maka nilai dari akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tersebut akan tumbuh dan dapat dilaporkan dengan terpercaya dan akuntabel.

2.1.7 Hubungan Kejelasan Sasaran Anggaran Dengan Akuntabilitas Kinerja

Menurut Halim (2013) Anggaran memiliki peran penting dalam pelaksanaan kinerja di instansi pemerintah. Tidak seperti di sektor bisnis yang menjadikan anggaran sebagai dokumen rahasia perusahaan sehingga tertutup untuk pihak luar, di sektor publik anggaran merupakan dokumen publik yang bisa diakses oleh publik untuk diketahui, diberi masukan, dikritisi dan diperdebatkan. Karena itulah anggaran sektor publik harus benar - benar jelas sarannya. Kejelasan sasaran anggaran harus sesuai dengan spesifikasi sasaran anggaran. Kegiatan yang dilakukan spesifikasinya sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai. Kejelasan sasaran anggaran harus memperhatikan kepentingan pada setiap program.

Adanya sasaran anggaran yang jelas akan mempermudah pertanggungjawaban terhadap keberhasilan maupun kontrol antisipasi terhadap kegagalan pelaksanaan tugas yang tidak sesuai dengan sasaran dan tujuan yang

telah ditetapkan. Hal ini berimplikasi pada peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja. Sasaran anggaran pemerintah harus dinyatakan secara jelas, spesifik dan dapat dimengerti oleh mereka yang bertanggung jawab untuk menyusun dan melaksanakan kegiatan anggaran tersebut.

2.1.8 Hubungan Aktivitas Pengendalian Dengan Akuntabilitas Kinerja

Untuk menjamin bahwa strategi yang dijalankan untuk mencapai tujuan organisasi sektor publik dilakukan secara ekonomis, efisien dan efektif, diperlukan suatu aktivitas pengendalian yang efektif. Menurut COSO dalam Widyaningsih (2010) Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan manajemen untuk memenuhi tujuannya untuk pelaporan keuangan dan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan tertentu satuan usaha akan tercapai. Dalam Soleha (2014) Steinthorsedotir (2003:97) menyatakan bahwa pengendalian intern merupakan aspek yang sangat penting dari corporate governance. Manajemen menggunakan sistem pengendalian untuk menjamin tujuan organisasi tercapai. Pengendalian intern memainkan peran yang signifikan bagi organisasi terhadap terciptanya good corporate governance, hal tersebut menjadikan perusahaan untuk memenuhi praktek pengelolaan perusahaan yang baik.

Proses pengendalian intern harus dipandang secara realistis, yang memberikan jaminan yang reasonable yang melegitimasi bahwa tujuan akan tercapai. Maksud tersebut dapat pula diterapkan pada pemerintahan. Berry, Anthony J. (2005) meneliti akuntabilitas dan pengendalian di organisasi gereja yang merupakan organisasi sosial di Inggris. Akuntabilitas ini terdiri dari perjanjian, konstitusi dan kontrak (covenant, constitution and contract). Dewan

keuskupan dalam akuntabilitas kepada muktamar umum dengan cara: laporan hasil, membuat anggaran, memberikan akun yang telah diaudit, memberikan laporan reguler dari bisnis. Berry, Anthony J. (2005) menunjukkan adanya hubungan antara aktivitas pengendalian dan akuntabilitas.

Akuntabilitas kinerja dapat meningkat jika aktivitas pengendalian ini dilakukan secara rutin dan berkala untuk meminimalisir tindakan kecurangan dan dapat mengontrol semua unit terkecil sekalipun. Hal ini agar sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ada sehingga akuntabilitas kinerja dapat dicapai.

2.2 Penelitian Terdahulu

Konsep dasar atau sebagai acuan yang berupa teori –teori serta temuan – temuan hasil dari berbagai penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat penting dapat memberikan penjelasan pendukung. Penelitian terdahulu merupakan salah satu alat pendukung dari sebuah penelitian yang memberikan informasinya mengenai apa yang diteliti serta mampu mendukung teori serta mampu mendukung konsep - konsep yang digunakan dalam sebuah penelitian. Untuk memudahkan pemahaman dalam penelitian ini, berikut di sajikan rincian mengenai penelitian – penelitian terdahulu yang mampu mendukung data atau informasi yang digunakan.

Tabel 2.1
Review Penelitian Terdahulu

NO	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Sri Cahyati (2016)	Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi Publik, dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan pada SKPD di	Hasil penelitian ini menyimpulkan sebagai berikut : 1. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi Publik, Aktivitas

		Pemerintahan Kabupaten Asahan dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Intervening dan Pelatihan Kerja Sebagai Variabel Moderating	<p>Pengendalian, dan Pelatihan Kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah, sedangkan Komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah.</p> <p>2. Secara bersama-sama Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi Publik, Aktivitas Pengendalian, Komitmen organisasi dan Pelatihan Kerja berpengaruh positif dan Signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah sebesar 50,99 %.</p>
2.	Edipson Bayer Silalahi (2017)	Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Internal Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating Pada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai	<p>Hasil penelitian ini menyimpulkan sebagai berikut :</p> <p>Kejelasan sasaran anggaran, pengendalian internal dan sistem pelaporan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kabupaten Serdang Bedagai. Secara parsial pengendalian internal dan sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sedangkan kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kabupaten Serdang Bedagai, namun memiliki nilai positif.</p>
3.	Rahima Br. Purba, Azima Medina Amrul (2017)	Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi Publik Dan Aktivitas Pengendalian	<p>Hasil penelitian ini menyimpulkan sebagai berikut :</p> <p>1. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah</p>

		Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Tanah Datar	tidak berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah. 2. Transparansi Publik tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas Keuangan. 3. Aktivitas Pengendalian tidak berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan. 4. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi Publik dan Aktivitas Pengendalian tidak berpengaruh secara simultan terhadap Akuntabilitas keuangan.
4.	Rio Pratama, Henri Agustin, Salma Taqwa (2019)	Pengaruh Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Kabupaten Padang Pariaman	Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: (1) Pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kab. Padang Pariaman. (2) Sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kab. Padang Pariaman. (3) Kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kab. Padang Pariaman.
5.	Muhammad Saifrizal (2019)	Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Kabupaten Bireun	1. Kejelasan sasaran anggaran memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas. 2. Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas kinerja di Pemerintahan Kabupaten Bireun

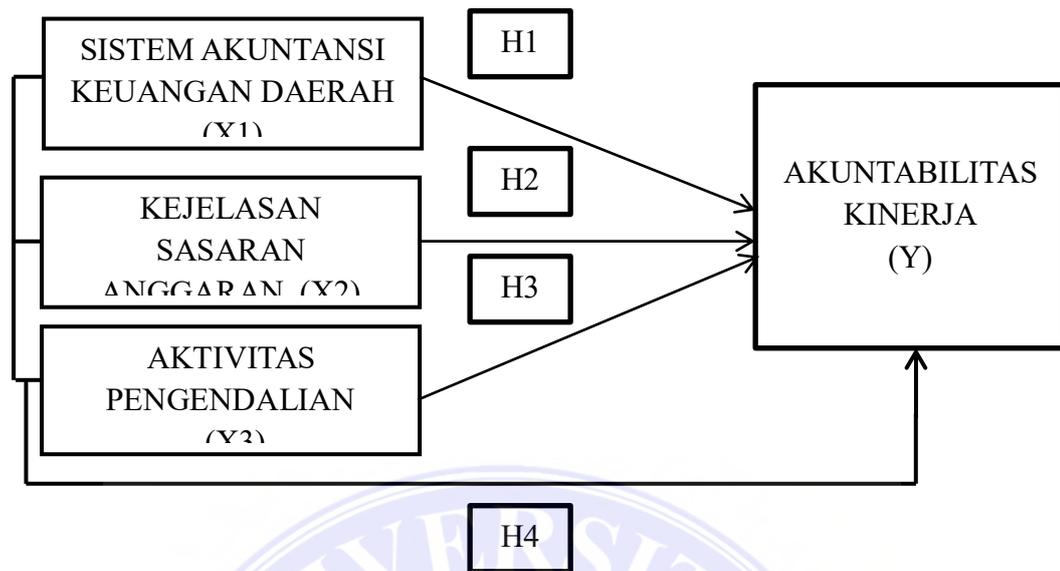
3. Kejelasan sasaran anggaran dan penerapan sistem keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas, dengan koefisien determinasi se-besar 0,837 yang berarti bahwa 83,72% variasi pada variabel Akuntabilitas mampu diterangkan oleh kedua variabel bebas.

2.3. Perbedaan Penelitian

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian lainnya adalah variabel independen yang digunakan berbeda dengan penelitian sebelumnya. Variabel penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, kejelasan sasaran anggaran dan aktivitas pengendalian belum pernah diteliti secara bersamaan sebelumnya. Sampel penelitian yang digunakan juga berbeda dengan mengambil sampel di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara dan Kantor Pertanahan Kota Medan. Sedangkan penelitian sebelumnya di pemerintah kota dan pemerintah provinsi.

2.4 Kerangka Konseptual

Berdasarkan penjelasan teori – teori diatas. Maka, dapat dibuat secara skematis kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

2.4 Hipotesis

Berdasarkan kerangka konseptual diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

- H1 : Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja.
- H2 : Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja.
- H3 : Aktivitas Pengendalian berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja.
- H4 : Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Aktivitas Pengendalian berpengaruh positif secara simultan (bersamaan) terhadap Akuntabilitas Kinerja

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Untuk jenis penelitian dalam penelitian ini, penelitian asosiatif kausal yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian. Menurut Suliyanto (2014) dalam Timotius (2017), penelitian yang dilakukan untuk menganalisis hubungan atau pengaruh antara 2 atau lebih variabel atau untuk menganalisis pengaruh antar variabel disebut penelitian asosiatif kausal. Penelitian ini dilakukan untuk memahami dan membuktikan hubungan sistem akuntansi keuangan daerah, kejelasan sasaran anggaran dan aktivitas pengendalian sebagai variabel independen terhadap akuntabilitas kinerja sebagai variabel dependen.

3.1.2 Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data yang relevan dalam penulisan ini, penulis mengadakan penelitian di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara yang beralamat di Jalan Brigadir Jendral Katamso No. 45, Kampung Baru, Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara 20218, Tlp (061) 4560017, Website : sumut.atrbpn.go.id.

3.1.3 Waktu Penelitian

Waktu penelitian direncanakan dari bulan Oktober 2019 sampai Juni 2020. Adapun rincian kegiatan penelitian yang direncanakan lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1
Rencana Waktu Penelitian

NO	Uraian Kegiatan	2019			2020	
		Okt	Nov	Des	Jan - Jul	Agt
1.	Pengajuan judul	■				
2.	Penyusunan proposal	■	■			
3.	Bimbingan Proposal		■	■		
4.	Seminar proposal			■		
5.	Akumulasi data dan pengolahan data				■	
6.	Bimbingan skripsi				■	
7.	Seminar hasil					■
8.	Pengajuan sidang meja hijau					■

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

3.2.1 Populasi Penelitian

Menurut Supranto dan Limakrisna (2013), Populasi ialah seluruh kumpulan elemen yang sejenis akan tetapi berbeda karena karakteristiknya. Populasi (*population*) berarti penduduk, kalau elemennya orang. Jadi populasi tidak harus berarti penduduk. Dengan demikian ada populasi perusahaan, populasi mobil, populasi pasar, populasi perguruan tinggi, populasi koperasi. Berdasarkan pendapat tersebut, dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh sumber daya manusia yang berada di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara dan Kantor Pertanahan Kota Medan.

3.2.2 Sampel Penelitian

Dalam hubungan populasi dan sampel Prof. Sutrisno Hadi, MA dalam Lubis dkk (2017), menjelaskan bahwa sampel adalah sebagian individu yang diselidiki dari keseluruhan individu penelitian. Teknik pengambilan sampel dalam

penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Adapun sampel pada penelitian ini adalah para pejabat yang terlibat dalam proses keuangan, pelaporan dan penyusunan anggaran yang terdiri dari pejabat Eselon III (kepala bidang/bagian), pejabat Eselon IV (kepala subbagian/seksi) dan Staf Administrasi Keuangan di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara dan Kantor Pertanahan Kota Medan. Maka total responden dalam penelitian ini berjumlah 38 orang.

3.3 Definisi Operasional Variabel

Berdasarkan jenis penelitian asosiatif kausal yang merupakan desain penelitian yang menunjukkan hubungan antara variabel – variabel independen terhadap variabel dependen , maka variabel – variabel yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

3.3.1 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Pada penelitian ini sistem akuntansi keuangan daerah berperan sebagai variabel independen (X_1). Sistem akuntansi keuangan daerah dalam penelitian ini mengenai sistem akuntansi keuangan yang perpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Indikator yang digunakan dalam mengukur variabel ini diadopsi dari Cahyati (2016) yang juga diambil dari penelitian terdahulu yaitu Fikri (2015). Indikator dilandasi Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yang diharapkan dapat menjadi ukuran paham atau tidaknya sistem akuntansi keuangan daerah.

3.3.2 Kejelasan Sasaran Anggaran

Pada penelitian ini kejelasan sasaran anggaran berperan sebagai variabel independen (X_2). Kejelasan sasaran anggaran dalam penelitian ini mengenai bagaimana anggaran yang telah dirumuskan telah direalisasikan tepat sasaran sesuai dengan tujuan awal anggaran itu dibuat.

Indikator yang digunakan dalam mengukur variabel ini diambil dari target sasaran strategis anggaran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara, agar pengukuran sasaran efektif ada 6 indikator yang diperlukan:

1. Tercapainya tujuan target operasional dan pelayanan.
2. Peningkatan proses penegakan hukum dan kepastian atas letak dan bidang tanah.
3. Terlaksananya program penataan agraria di daerah secara optimal.
4. Terlaksananya pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum.
5. Terkendalinya pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah di daerah.
6. Tercapainya penyelesaian sengketa, konflik dan perkara pertanahan.

3.3.3 Aktivitas Pengendalian

Pada penelitian ini aktivitas pengendalian berperan sebagai variabel independen (X_3). Mardiasmo (2009) menjelaskan, aktivitas pengendalian merupakan kebijakan, prosedur, teknik, dan mekanisme yang digunakan untuk menjamin arahan manajemen telah dilaksanakan.

Indikator yang digunakan dalam mengukur variabel ini diadopsi dari Cahyati (2016) yang juga diambil dari penelitian terdahulu yaitu dikutip dari Iskandar (2014), yaitu :

1. Harus sesuai Prinsip Akuntansi

2. Perekrutan dan Pengembangan SDM
3. Tugas Prosedur dalam Pekerjaan
4. Kesesuaian
5. Pemisahan Tugas
6. Independen.

3.3.4 Akuntabilitas Kinerja

Pada penelitian ini akuntabilitas kinerja adalah variabel dependen (Y) yang dipengaruhi oleh variabel – variabel independen. Akuntabilitas kinerja dalam penelitian ini adalah bagaimana individu – individu yang bekerja di instansi pemerintahan yang diberi kepercayaan oleh publik mengelola sumber daya untuk memenuhi kewajibannya mempertanggungjawabkan kinerja mereka sesuai tujuan awal perjanjian kinerja mereka.

Indikator yang digunakan dalam mengukur variabel ini diadopsi dari Reyhan (2017) yang juga diambil dari penelitian terdahulu yaitu dikutip Mardiasmo (2006:21), yaitu Untuk mengukur variabel ini digunakan indikator berupa :

1. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum, merupakan pelaporan untuk mengurangi tingkat ketidakpastian yang berkaitan dengan suatu masalah yang dihadapi pengambil keputusan.
2. Akuntabilitas Proses, merupakan pelaksanaan kegiatan yang ditentukan dengan menggunakan proses, prosedur dan ukuran – ukuran.
3. Akuntabilitas Pelaksanaan, merupakan pengamatan untuk melihat apakah kegiatan yang dilakukan sudah efisien dan efektif.

4. Akuntabilitas Program, merupakan penetapan dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
5. Akuntabilitas Kebijakan, merupakan pemilihan berbagai kebijakan yang akan diterapkan.

Tabel 3.2
Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Indikator
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X_1)	Akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan APBD. (Erlina dan Rasdianto, 2013)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesesuaian sistem akuntansi keuangan yang digunakan sudah memenuhi standar akuntansi pemerintahan. 2. Pembuatan laporan keuangan dan dilaporkan secara periodik. 3. Prosedur pencatatan transaksi dilakukan berdasarkan standar pencatatan akuntansi pada umumnya.
Kejelasan Sasaran Anggaran (X_2)	Kejelasan sasaran anggaran Merupakan salah satu karakteristik sistem penganggaran yang menunjukkan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian tersebut (Mardiasmo, 2009)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tercapainya tujuan target operasional dan pelayanan. 2. Peningkatan proses penegakan hukum dan kepastian atas letak dan bidang tanah. 3. Terlaksananya program penataan agraria di daerah secara optimal. 4. Terlaksananya pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum. 5. Terkendalinya pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah di daerah. 6. Tercapainya penyelesaian

		sengketa, konflik dan perkara pertanahan.
Aktivitas Pengendalian (X ₃)	Aktivitas pengendalian merupakan kebijakan, prosedur, teknik, dan mekanisme yang digunakan untuk menjamin arahan manajemen telah dilaksanakan. (Mardiasmo, 2009)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Harus sesuai prinsip akuntansi 2. Perekrutan dan pengembangan SDM 3. Tugas prosedur dalam pekerjaan 4. Kesesuaian pekerjaan 5. Pemisahan tugas 6. Independen.
Akuntabilitas Kinerja (Y)	Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. (Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum 2. Akuntabilitas proses 3. Akuntabilitas pelaksanaan 4. Akuntabilitas program 5. Akuntabilitas kebijakan (Mardiasmo, 2006)

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Menurut Sugiyono (2012) "Data kuantitatif yaitu data yang diperoleh dan dicatat untuk pertama kalinya dan merupakan data yang di peroleh dari lokasi penelitian,

melalui pengamatan serta wawancara serta buku atau literature lainnya”. Dalam penelitian ini data yang diperoleh adalah kuesioner kepada pegawai.

3.4.2 Sumber Data

Data primer diperoleh langsung dari objek penelitian, wawancara dan daftar pertanyaan yang disebarakan kepada responden, diolah dalam bentuk data melalui alat statistik yang diberikan pada pejabat Eselon III dan Eselon IV Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara dan Kantor Pertanahan Kota Medan.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian ini dengan metode survey menggunakan media kuesioner, yaitu pengumpulan data dengan menggunakan daftar pertanyaan/angket yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan diberikan kepada responden. Dimana responden memilih salah satu jawaban yang telah disediakan dalam daftar pertanyaan. Instrumen dalam kuesioner merupakan replikasi dari peneliti – peneliti terdahulu yaitu oleh Cahyati (2016), Silalahi (2017) dan Reyhan (2017).

Untuk mengukur pendapat responden digunakan skala likert. skala Likert yaitu mengukur sikap dengan mengatakan setuju atau ketidaksetujuannya terhadap pertanyaan yang diajukan. Jawaban responden akan diberi skor yaitu :

Skor 1 = Sangat tidak setuju

Skor 2 = Tidak setuju

Skor 3 = Netral

Skor 4 = Setuju

Skor 5 = Sangat setuju

3.6 Teknik Analisis Data

3.6.1 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

3.6.1.1 Uji Validitas

Uji validitas diperlukan untuk menghitung apakah data yang didapat setelah penelitian merupakan data meyakinkan dari instrumen ukur yang digunakan (angket) yang disebarakan kepada responden. Metode yang digunakan adalah dengan membandingkan nilai korelasi atau r_{hitung} variabel penelitian dengan nilai r_{tabel} . Tolak ukur dalam memastikan validitas kuesioner adalah sebagai berikut:

- a. Jikalau $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka pertanyaan dinyatakan valid/meyakinkan
- b. Jikalau $r_{hitung} < r_{tabel}$ maka pertanyaan dinyatakan tidak valid/tidak meyakinkan.

3.6.1.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dipakai untuk mengestimasi tingkat kestabilan hasil penilaian jikalau pengukuran berulang dilakukan terhadap gejala dan alat ukur yang sama. Menurut Suharsimi Arikunto (2002) dalam Supranto dan Limakrisna (2013) yang dimaksud dengan reliabilitas adalah untuk menunjukkan pemahaman bahwa suatu instrumen cukup handal untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. Reliabilitas menunjukkan tingkat keandalan tertentu. Sarana yang dapat diandalkan, dapat dipercaya, sangat dapat diandalkan.

Dalam Lubis (2017), uji konsistensi internal yang amat terkenal adalah Cronbach Alpha (α) (Sekaran, 2003). Reliabilitas Cronbach Alpha dikategorikan berdasarkan indeks kategorinya, yaitu: jika nilai α lebih dari 0,9 maka dikategorikan sangat baik ataupun mendekati sempurna, maka jikalau nilai α

antara 0,8 dan 0,9 maka dikategorikan baik . Kemudian jika nilai α berada diantara 0,7 - 0,8 maka dikategorikan cukup baik, dan jika nilai α antara 0,6 - 0,7 maka dapat dikatakan sedang atau sedang. Namun jika nilai α kurang dari 0,6 hal ini menunjukkan bahwa alat ukur yang digunakan memiliki tingkat reliabilitas yang rendah (Hair et al., 2010).

3.6.2 Uji Asumsi Klasik

Sebelum menguji hipotesis dengan menggunakan analisis regresi, perlu dilakukannya pengujian asumsi klasik yang meliputi pengujian : (a) normalitas, (b) multikolinearitas, dan (c) heterokedastisitas.

3.6.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas berperan untuk meninjau apakah nilai residual berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang berdistribusi normal, sehingga uji normalitas tidak dilakukan pada masing-masing variabel melainkan pada nilai residualnya (Lubis & Osman, 2015). Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi kedua variabel (independen dan dependen) berdistribusi normal atau paling tidak mendekati normal (Ghozali, 2013: 70). Uji normalitas dilakukan dengan pendekatan *Kolmogorov - Smirnov*. Dengan menggunakan taraf signifikan 5%, jika nilai *Pvalue* (Sig.) Berada di atas nilai signifikansi 5% maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut diambil dari populasi yang berdistribusi normal.

3.6.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas untuk memeriksa terdapat atau tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel independen dalam model regresi linier berganda (Garson, 2012). Jikalau terdapat korelasi yang tinggi antara variabel independen, maka

ikatan antara variabel independen dengan variabel dependen akan terhambat (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2012). Untuk melihat terdapat atau tidaknya gejala multikolinearitas bisa dilihat dari besarnya nilai Tolerance dan VIF (Variance Inflation Factor) dengan menggunakan program SPSS. Toleransi mengukur variabilitas variabel terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lain. Nilai umum yang biasanya digunakan adalah nilai Tolerance > 0.1 atau nilai VIF < 10 , sehingga tidak terjadi multikolinieritas.

3.6.2.3 Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas untuk memeriksa apakah terdapat ketidaksamaan varians dari pengamatan residual ke pengamatan lainnya (Lubis & Osman, 2015). Model regresi yang memenuhi syarat adalah residual suatu observasi sama dengan residual observasi lainnya yaitu tetap atau disebut mean square error (Garson, 2012). Model regresi yang baik tidak akan memiliki mean square error atau heteroskedastisitas. Gunakan uji Glejser untuk menguji heteroskedastisitas. Kriteria keputusannya adalah:

- a. Jikalau variabel independen signifikan secara statistik dalam mempengaruhi variabel dependen, hal ini menunjukkan adanya heteroskedastisitas.
- b. Jikalau probabilitas signifikansi lebih tinggi dari tingkat kepercayaan 5%, maka tidak terjadi heteroskedastisitas

3.6.3 Uji Regresi Linear Berganda

Analisis regresi adalah analisis statistik yang dirancang untuk memodelkan hubungan antara variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y). Jika kita ingin mengetahui bagaimana menggunakan variabel independen untuk memprediksi

variabel dependen secara signifikan, maka lakukan analisis regresi (Parulian, 2011).

Jika variabel independen lebih besar dari satu dan bentuk persamaannya linier, maka digunakan analisis linier berganda, dan regresi tersebut disebut regresi linier berganda. Rumus persamaan regresi berganda untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Akuntabilitas Kinerja

a = konstanta

b₁ = Koefisien regresi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

b₂ = Koefisien regresi Kejelasan Sasaran Anggaran

b₃ = Koefisien regresi Aktivitas Pengendalian

X₁ = Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

X₂ = Kejelasan Sasaran Anggaran

X₃ = Aktivitas Pengendalian

e = standar error pada tingkat 5%

3.6.4 Uji Hipotesis

3.6.4.1 Uji Parsial (Uji-t)

Uji statistik t disebut juga uji signifikansi personal. Pengujian tersebut menunjukkan tingkat pengaruh variabel independen terhadap beberapa variabel dependen. Format tesnya adalah:

$H_0 : b_1 = 0$, artinya menunjukkan bahwa bagian variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen

$H_a : b_1 \neq 0$, artinya menunjukkan bahwa variabel independen berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen

Kriteria pengambilan keputusan :

Apabila probabilitas $< \alpha = 5\%$, terima H_a

Jika probabilitas $> \alpha = 5\%$, maka H_a ditolak

3.6.4.2 Uji Signifikasi Simultan (Uji F)

Pengujian pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model memiliki pengaruh terhadap variabel dependen pada saat yang bersamaan.

a. Format pengujiannya

$$H_0 : b_1 = b_2 = b_3 = b_4 = 0$$

Artinya independensi, sistem akuntansi keuangan daerah, kejelasan sasaran anggaran dan aktivitas pengendalian secara simultan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja.

$$H_a : b_1 \neq b_2 \neq b_3 \neq b_4 \neq 0$$

Artinya independensi, sistem akuntansi keuangan daerah, kejelasan sasaran anggaran dan aktivitas pengendalian secara simultan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja.

b. Tolak ukur pengambilan keputusan

Jikalau probabilitas $< 0,05$, maka H_a diterima dan H_0 ditolak.

Jikalau probabilitas $> 0,05$, maka H_a ditolak dan H_0 diterima.

3.6.4.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Koefisien determinasi (R^2) pada dasarnya mengukur kemampuan model untuk menjelaskan perubahan variabel dependen. Nilai koefisien

determinasi antara 0 dan 1. Nilai yang lebih kecil (R^2) menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen dalam menjelaskan perubahan variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati 1 menunjukkan bahwa variabel independen menyediakan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Secara umum, karena perbedaan yang besar antara masing-masing pengamatan, maka koefisien kepastian untuk data cross-sectional relatif rendah, sedangkan data deret waktu biasanya memiliki koefisien kepastian yang tinggi (Ghozali, 2006). Insukindro (1998) menekankan bahwa koefisien determinasi hanyalah kriteria pemilihan model yang baik, bukan satu-satunya kriteria. Alasannya adalah jikalau estimasi regresi linier menghasilkan koefisien kepastian yang tinggi, tetapi tidak sejalan dengan teori ekonomi yang dipilih oleh peneliti, atau gagal dalam uji hipotesis klasik, maka model tersebut bukan merupakan model estimasi yang baik dan sebaiknya tidak dipilih sebagai model empiris.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, kejelasan sasaran anggaran dan aktivitas pengendalian terhadap akuntabilitas kinerja pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara. Berdasarkan hasil pengujian analisis yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara. Hal ini menggambarkan semakin tinggi penerapan sistem akuntansi keuangan daerah maka akan semakin tinggi pula akuntabilitas kinerja pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara. Dengan semakin baik analisis dan identifikasi di setiap transaksi keuangan maka akan semakin baik akuntabilitas kinerja.
2. Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara. Hal ini menggambarkan semakin tinggi kejelasan sasaran anggaran maka akan semakin tinggi pula akuntabilitas kinerja pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara. Dengan meningkatkan sasaran anggaran untuk penyelesaian konflik pertanahan sesuai target maka akan semakin baik akuntabilitas kinerja.
3. Aktivitas pengendalian berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional

Sumatera Utara. Hal ini menggambarkan semakin tinggi aktivitas pengendalian maka akan semakin tinggi pula akuntabilitas kinerja pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara. Dengan meningkatkan pengendalian terhadap setiap personel untuk melakukan tugas dan fungsinya masing – masing maka akan semakin baik akuntabilitas kinerja.

4. Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, kejelasan sasaran anggaran dan aktivitas pengendalian secara simultan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara. Hal ini menunjukkan bahwa jika penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, kejelasan sasaran anggaran dan aktivitas pengendalian mengalami kenaikan, maka akuntabilitas kinerja juga akan mengalami kenaikan.

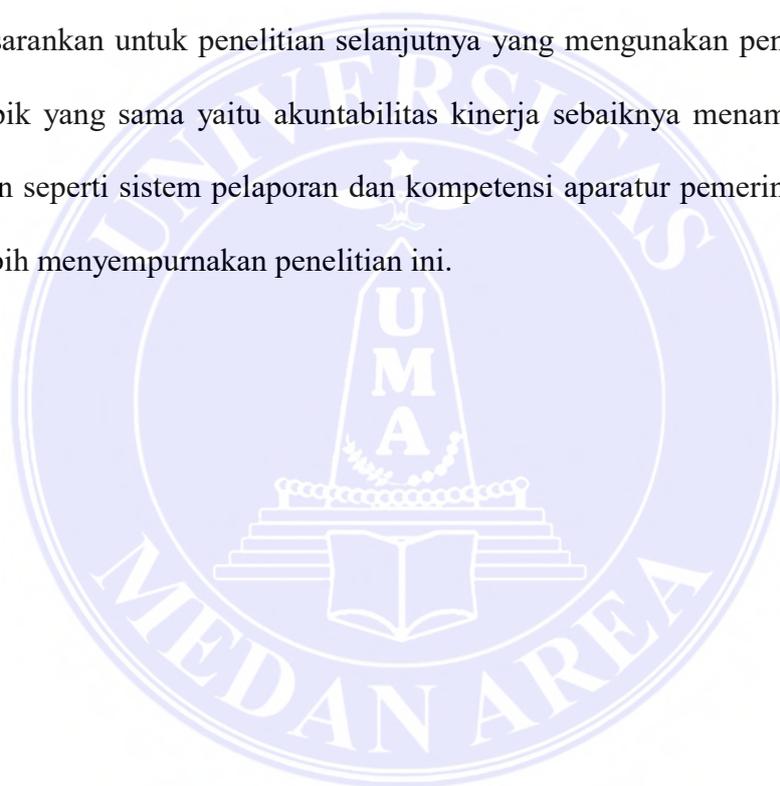
5.2 Saran

Adapun saran dalam penelitian ini adalah :

1. Bagi Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara, disarankan agar lebih memperkuat pengawasan prosedur pencatatan transaksi sesuai standar akuntansi yang berlaku umum dengan lebih meningkatkan pelaksanaan analisis dan pengidentifikasian terhadap setiap pencatatan. Kedua, meningkatkan pencapaian sasaran anggaran penyelesaian konflik pertanahan dengan membentuk tim yang secara khusus melakukan penyelesaian konflik pertanahan agar sasaran anggaran dapat terpenuhi. Dan yang terakhir, adanya penyesuaian pekerjaan sesuai tugas dan fungsinya

masing – masing dengan menerapkan kebijakan seperti hanya setiap personel yang terkait saja yang diizinkan untuk menandatangani cek.

2. Bagi Peneliti selanjutnya, disarankan peneliti selanjutnya juga dapat menggunakan metode Focus Group Discussion (FGD) sehingga dapat diketahui kondisi yang sebenarnya terjadi pada objek penelitian dan kesimpulan yang dapat diambil akan luas dan tidak hanya didasarkan pada data yang terkumpul melalui penggunaan instrumen tertulis saja. Dan juga disarankan untuk penelitian selanjutnya yang menggunakan penelitian dengan topik yang sama yaitu akuntabilitas kinerja sebaiknya menambahkan faktor lain seperti sistem pelaporan dan kompetensi aparatur pemerintah agar dapat lebih menyempurnakan penelitian ini.



DAFTAR PUSTAKA

- Br. Purba, R., & Amrul, A. M. (2017). *Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi Publik dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar*. Jurnal Universitas Panca Budi, 8 (1), 99 – 111, Medan.
- Cahyati, S. (2016). *Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi Publik, dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan pada SKPD di Pemerintahan Kabupaten Asahan dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Intervening dan Pelatihan Kerja Sebagai Variabel Moderating*. Skripsi, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Erlina. (2008). *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)*. USU Press, Medan.
- Erlina & Rasdianto. (2013). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua*. USU Press, Medan.
- Halim, A & Kusufi, S. (2013). *Teori, Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat, Jakarta.
- Halim, A & Kusufi, S. (2014). *Akuntansi Keuangan Daerah (Edisi 4)*. Salemba Empat, Jakarta.
- Kenis, I. (1979). *Effects on Budgetary Goal Characteristic on Managerial Attitudes and Performance*. The Accounting Review LIV (4). 707-721.
- Lubis, Z., Sutrisno, & Lubis, A. S., (2017). *Panduan Praktis Praktikum SPSS*. Pusat Komputer Universitas Medan Area, Medan.
- Lumenta, A., L, Morasa, J, & Mawikere, L. (2016). *Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Ketaatan Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Jurnal EMBA, 4(3), 135-146, Manado.
- Mahmudi. (2011). *Akuntansi Sektor Publik (Edisi 2)*. UII Press, Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi, Yogyakarta.
- Narbuko, C & Achmadi, A. (2015). *Metodologi Penelitian*. Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.

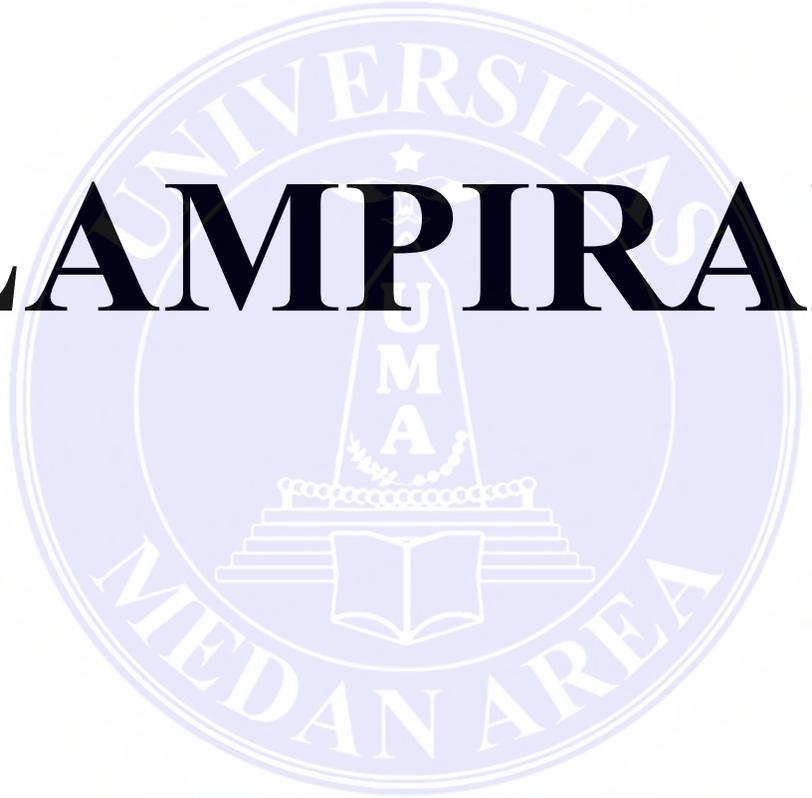
- Nordiawan, D & Hertianti, A. (2010). *Akuntansi Sektor Publik (Edisi 2)*. Salemba Empat, Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2010 *Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*
- Pratama, R., Agustin, H & Taqwa, S. (2019). *Pengaruh Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Jurnal Eksplorasi Akuntansi, 1(1) Seri D, 429-444, Padang.
- Renyowijoyo, M. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba (Edisi 2)*. Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 *Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 *Tentang Standar Sistem Pengendalian Pemerintah*.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 *Tentang Standar Akuntansi Pemerintah*.
- Republik Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 *Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*.
- Reyhan, M., H. (2017). *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus pada SKPD Pemerintah Propinsi Sumatera Utara)*. Skripsi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Saifrizal, M. (2019). *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Kabupaten Bireun*. Jurnal Kebangsaan, 8(16), 51-59, Bireun.
- Silalahi, E., B. (2017). *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Internal Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating Pada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai*. Tesis. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Sumatera Utara. Medan.

- Soleha, N. (2014). *Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan: Studi Pada Skpd Kabupaten/Kota Propinsi Banten*. Jurnal Etikonomi, 13(1), 21 – 34, Serang.
- Supranto, J., & Limakrisna, N. (2013). *Petunjuk Praktis Penelitian Ilmiah Untuk Menyusun Skripsi, Tesis, Dan Disertasi (Edisi 3)*. Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Timotius, K. (2017). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Widyaningsih, A. (2010). *Pengaruh Audit Internal Terhadap Efektivitas Pengendalian Intern Biaya Produksi*. 5(1). 43-54, Bandung.
- Yuhertiana, I. (2003). *Principal-Agent Theory dalam Proses Perencanaan Anggaran Sektor Publik*. *KOMPAK: Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Sistem Informasi*, No.9 April:403-422. FE UTY, Yogyakarta.

<https://www.menpan.go.id>.

<http://sumut.atrbpn.go.id/>.

LAMPIRAN



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 24/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)24/12/21

Lampiran 1 : Kuesioner Penelitian

KUESIONER

Kuesioner Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara

Kepada Yth :

Bapak/Ibu/Saudara Responden

Di Tempat

Dalam rangka penelitian untuk penyusunan tugas akhir (Skripsi) Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Medan Area. Saya memohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara agar sudi kiranya memberikan tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner ini. Informasi yang Bapak/Ibu/Saudara/Saudari berikan merupakan bantuan yang sangat berarti dalam menyelesaikan penelitian skripsi saya. Dan saya menjamin serta bertanggung jawab atas informasi yang Bapak/Ibu/Saudara/Saudari berikan adalah untuk kepentingan akademis semata.

Atas bantuan dan perhatian yang Bapak/Ibu/Saudara/Saudari berikan, saya ucapkan terima kasih.

(Fadhillah Ramadhani)

LEMBAR KUESIONER

A. PETUNJUK PENGISIAN

a. Semua jawaban/isian atas pertanyaan/pernyataan dalam kuesioner ini akan dijaga kerahasiaannya, oleh karena itu dimohonkan kepada Bapak/Ibu untuk memberikan jawaban sesuai dengan persepsi Bapak/Ibu.

b. Tidak ada jawaban yang benar atau salah, dikarenakan kuesioner ini hanya ingin menggali persepsi Bapak/Ibu atas variabel-variabel yang akan diteliti.

c. Sebelum menjawab pertanyaan/pernyataan dimohonkan kepada Bapak/Ibu untuk mengisi identitas terlebih dahulu sesuai formulir isian yang disediakan.

d. Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan jawaban yang sesuai atas pernyataan – pernyataan berikut dengan memilih skor yang tersedia dengan memberi tanda cheklist (√). Jika menurut Bapak/Ibu tidak ada jawaban yang tepat, maka jawaban dapat diberikan pada pilihan yang paling mendekati. Adapun skor untuk masing-masing jawaban adalah sebagai berikut :

STS : Sangat Tidak Setuju (diberi skor 1)

TS : Tidak Setuju (diberi skor 2)

N : Netral (diberi skor 3)

S : Setuju (diberi skor 4)

SS : Sangat Setuju (diberi skor 5)

B. IDENTITAS RESPONDEN

Nama : _____ (*)

Umur : _____

Jenis Kelamin : _____

Jabatan : _____

Pendidikan Terakhir : _____

(*) Boleh tidak diisi/inisial

C. DAFTAR PERTANYAAN**1. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah**

NO	PERTANYAAN	STS (1)	TS (2)	N (3)	S (4)	SS (5)
1	Sistem Akuntansi Keuangan pada Instansi ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan .					
2	Setiap transaksi keuangan pada Instansi ini dilakukan dengan analisis transaksi / identifikasi transaksi.					
3	Pada Instansi ini dilaksanakan pengidentifikasian terhadap pencatatan.					
4	Setiap transaksi keuangan pada Instansi ini didukung oleh bukti transaksi.					
5	Pada Instansi ini semua transaksi keuangan dilakukan pencatatan secara kronologis.					
6	Pada Instansi ini dilakukan Pengklasifikasian terhadap transaksi yang terjadi.					
7	Pada Instansi ini dilakukan klasifikasi atau transaksi sesuai dengan pos-pos semestinya .					
8	Sistem pengendalian dilakukan dalam mengukur dan melaporkan pencatatan .					
9	Pembuatan laporan keuangan dilakukan setiap periode akuntansi .					
10	Pelaporan laporan keuangan dilakukan secara konsisten dan periodik.					

Sumber : Fikri (2015) dalam Cahyati (2016)

2. Kejelasan Sasaran Anggaran

NO	PERTANYAAN	STS (1)	TS (2)	N (3)	S (4)	SS (5)
1	Sasaran anggaran operasional dan pelayanan mencapai target.					
2	Adanya peningkatan proses pencapaian sasaran anggaran pada satuan kerja ini .					
3	Pelaksanaan sasaran anggaran pada setiap program/kegiatan di daerah dilakukan secara optimal.					
4	Saya dapat mengetahui pentingnya manfaat sasaran anggaran satuan kerja ini bagi kepentingan umum.					
5	Setiap program/kegiatan pertanahan yang tercantum dalam anggaran telah terkendali dengan tepat dan terukur					
6	Sasaran anggaran penyelesaian konflik pertanahan mencapai target					

3. Aktivitas Pengendalian

NO	PERATANYAAN	STS (1)	TS (2)	N (3)	S (4)	SS (5)
1	Pemilihan prinsip akuntansi dan pengembangan estimasi akuntansi konsisten dengan tujuan dan pelaporan yang wajar.					
2	Kebijakan dan prosedur personel yang ada menghasilkan perekrutan atau pengembangan orang yang berkompeten dan dapat dipercaya yang diperlukan untuk mendukung struktur pengendalian intern yang efektif					
3	Personel harus memahami tugas prosedur dalam pekerjaan mereka masing-masing.					
4	Setiap transaksi pembelanjaan terdapat nota pembayaran yang disetujui dengan dokumen pendukung untuk setiap cek yang disiapkan.					

NO	PERATANYAAN	STS (1)	TS (2)	N (3)	S (4)	SS (5)
5	Hanya personel yang mempunyai orientasi yang diizinkan untuk menandatangani cek.					
6	Penandatanganan cek dengan memeriksa kesesuaian dari detil cek nota pembayaran sebelum menandatangani.					
7	Terdapat pemisahan tugas antara : personel yang memberi persetujuan nota pembayaran dan personel yang menanda tangani cek, antara personel yang menandatangani cek dan personel yang mencatat cek.					
8	Pengecekan independen atas kesesuaian iktisar cek harian yang diterbitkan dengan jurnal untuk pengeluaran kas.					

Sumber : Soleha (2011) dalam Cahyati (2016)

4. Akuntabilitas Kinerja

NO	PERNYATAAN	STS (1)	TS (2)	N (3)	S (4)	SS (5)
1	Adanya keterkaitan yang erat antara pencapaian kinerja dengan program dan kebijakan.					
2	Melakukan analisis keuangan setiap kegiatan atau program selesai dilaksanakan.					
3	Melakukan pengecekan terhadap jalannya program.					
4	Kurangnya insentif berupa imbalan atau pengakuan positif, tidak menghambat penggunaan informasi kinerja dalam pengambilan keputusan di organisasi.					
5	Pimpinan dan pegawai mempertanggungjawabkan (accountable) hasil dari suatu program/kegiatan/proyek yang telah dilakukan.					
6	Pimpinan dan pegawai selalu terlibat bersama-sama dalam mengevaluasi hasil suatu program/kegiatan/proyek.					

Sumber : Reyhan (2017)

Lampiran 2 : Distribusi Jawaban Responden

No Responden	SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH										Total X1
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.9	X1.10	
1	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	38
2	5	4	4	5	4	4	5	4	5	5	45
3	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	42
4	5	5	5	5	4	5	4	5	4	4	46
5	4	4	4	4	4	4	5	5	4	5	43
6	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	32
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
8	4	2	3	3	4	2	4	4	4	4	34
9	4	4	4	4	4	4	5	5	4	5	43
10	5	3	4	3	3	3	3	3	4	4	35
11	5	3	5	5	4	4	4	4	4	4	42
12	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
13	4	2	3	3	4	2	4	4	4	4	34
14	4	2	1	3	3	2	1	2	3	4	25
15	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	32
16	4	4	4	5	5	5	4	4	5	5	45
17	5	4	4	4	5	5	5	4	5	5	46
18	4	2	3	3	4	2	4	4	4	4	34
19	4	3	4	4	3	3	4	4	4	5	38
20	5	3	5	5	4	4	5	5	4	4	44
21	4	2	3	3	4	2	3	4	4	4	33
22	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	32
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
24	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	31
25	5	4	4	4	4	4	5	4	4	5	43
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
27	3	2	1	3	3	2	1	2	3	4	24
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
29	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	42
30	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
31	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	42
32	5	4	4	4	4	4	4	3	4	4	40
33	4	3	3	3	4	3	4	4	4	4	36
34	4	3	3	3	4	3	4	4	4	4	36
35	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	32
36	5	4	5	5	4	4	5	5	4	4	45
37	4	2	1	3	3	2	1	2	3	4	25
38	4	4	4	4	4	5	4	4	4	5	42

No Responden	KEJELASAN SASARAN ANGGARAN						Total X2
	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	
1	4	4	3	3	4	4	22
2	4	4	4	5	4	4	25
3	4	4	4	3	4	4	23
4	4	4	4	4	5	5	26
5	4	4	4	4	4	5	25
6	5	4	3	3	4	2	21
7	5	4	4	5	4	5	27
8	4	4	4	4	4	4	24
9	4	5	5	4	5	4	27
10	4	4	4	4	4	4	24
11	5	4	4	4	4	4	25
12	4	4	4	4	4	4	24
13	4	2	4	4	4	4	22
14	4	4	4	4	4	4	24
15	4	4	4	4	4	4	24
16	4	4	4	5	4	5	26
17	5	5	4	4	4	5	27
18	4	5	4	4	4	4	25
19	4	4	4	3	4	4	23
20	5	5	5	5	5	5	30
21	3	3	3	3	3	3	18
22	4	4	4	4	4	4	24
23	4	4	4	4	4	4	24
24	4	4	3	4	4	3	22
25	4	5	4	4	5	4	26
26	5	5	4	4	5	5	28
27	5	5	4	4	4	4	26
28	4	4	4	5	5	4	26
29	4	4	4	4	4	4	24
30	4	4	4	5	5	4	26
31	5	5	4	4	4	4	26
32	4	4	4	4	4	4	24
33	4	4	4	3	5	5	25
34	3	3	4	4	3	3	20
35	4	3	3	4	3	3	20
36	3	3	3	4	3	3	19
37	4	4	3	3	4	3	21
38	5	4	4	4	4	3	24

No Responden	AKTIVITAS PENGENDALIAN								Total X3
	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	X3.7	X3.8	
1	4	3	3	3	3	3	3	3	25
2	4	5	4	5	4	4	5	4	35
3	3	4	4	5	4	4	4	4	32
4	4	5	4	5	4	4	4	5	35
5	4	4	4	4	4	4	4	5	33
6	3	3	3	3	3	4	3	4	26
7	4	4	5	4	5	5	4	4	35
8	4	2	3	3	2	2	3	2	21
9	4	4	5	4	4	4	4	4	33
10	4	3	3	3	3	3	4	3	26
11	5	4	5	4	4	4	4	4	34
12	4	4	4	4	4	4	4	4	32
13	4	3	3	3	4	4	4	3	28
14	4	4	3	3	3	3	3	3	26
15	4	4	3	3	3	3	3	3	26
16	4	4	4	4	4	4	4	5	33
17	4	4	4	4	4	4	4	4	32
18	3	2	3	4	3	4	3	3	25
19	4	4	4	4	4	4	4	3	31
20	5	5	5	5	5	5	5	5	40
21	4	3	3	3	3	3	3	3	25
22	4	4	4	4	4	4	4	4	32
23	4	4	4	4	4	4	4	4	32
24	4	3	3	3	3	3	3	3	25
25	4	4	4	5	5	5	4	5	36
26	5	5	4	4	3	4	4	4	33
27	2	3	3	4	3	3	3	3	24
28	5	4	4	4	5	4	4	4	34
29	4	4	5	5	4	4	4	4	34
30	2	3	3	3	1	2	3	3	20
31	4	3	4	4	4	5	4	4	32
32	3	4	5	4	4	4	4	5	33
33	5	4	4	4	4	4	4	4	33
34	4	3	3	4	3	3	3	3	26
35	4	3	3	3	3	3	3	3	25
36	4	4	4	4	4	4	4	4	32
37	4	4	4	4	4	4	4	3	31
38	4	4	5	5	4	4	4	4	34

No Responden	AKUNTABILITAS KINERJA						Total Y
	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	
1	4	3	3	4	3	3	20
2	4	4	5	4	5	4	26
3	4	4	5	5	4	4	26
4	4	4	4	5	4	5	26
5	4	5	4	5	4	5	27
6	3	3	3	3	3	4	19
7	4	4	4	4	5	4	25
8	4	3	3	3	4	4	21
9	5	4	4	4	4	5	26
10	4	3	3	3	3	3	19
11	4	4	4	4	5	4	25
12	4	4	4	4	4	4	24
13	4	3	3	4	3	4	21
14	3	4	3	2	2	4	18
15	4	3	3	3	3	3	19
16	4	4	4	4	5	4	25
17	4	4	4	4	4	4	24
18	4	4	3	3	3	3	20
19	4	4	4	3	4	4	23
20	5	5	5	5	5	5	30
21	4	4	3	3	3	3	20
22	4	4	4	4	4	4	24
23	4	4	4	4	4	4	24
24	3	3	3	3	3	3	18
25	5	4	4	3	4	4	24
26	4	4	4	4	4	5	25
27	4	3	3	3	4	4	21
28	4	4	4	4	4	4	24
29	4	3	4	4	4	5	24
30	4	3	3	3	4	4	21
31	4	4	5	3	4	4	24
32	5	4	4	4	5	5	27
33	4	4	4	4	4	4	24
34	4	3	3	3	3	3	19
35	4	4	3	3	3	3	20
36	5	4	4	4	4	5	26
37	4	3	3	3	3	3	19
38	4	4	4	4	4	4	24

Lampiran 3 : Hasil Uji Statistika

A. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Correlations											
	X1_1	X1_2	X1_3	X1_4	X1_5	X1_6	X1_7	X1_8	X1_9	X1_10	totalX 1
X1_1 Pearson Correlati on Sig. (2- tailed) N	1 ,548** ,002 30	,548** ,002 30	,434* ,016 30	,267 ,153 30	,355 ,055 30	,333 ,072 30	,267 ,153 30	,413* ,023 30	,330 ,075 30	,327 ,077 30	,592** ,001 30
X1_2 Pearson Correlati on Sig. (2- tailed) N	,548** ,002 30	1 ,002 30	,591** ,001 30	,605** ,000 30	,659** ,000 30	,368* ,045 30	,471** ,009 30	,457* ,011 30	,413* ,023 30	,302 ,105 30	,747** ,000 30
X1_3 Pearson Correlati on Sig. (2- tailed) N	,434* ,016 30	,591** ,001 30	1 ,001 30	,623** ,000 30	,508** ,004 30	,588* ,001 30	,346 ,061 30	,591** ,001 30	,434* ,016 30	,339 ,067 30	,758** ,000 30
X1_4 Pearson Correlati on Sig. (2- tailed) N	,267 ,153 30	,605** ,000 30	,623** ,000 30	1 ,000 30	,680** ,000 30	,379* ,039 30	,600** ,000 30	,605** ,000 30	,668** ,000 30	,544** ,002 30	,824** ,000 30
X1_5 Pearson Correlati on Sig. (2- tailed) N	,355 ,055 30	,659** ,000 30	,508** ,004 30	,680** ,000 30	1 ,000 30	,420* ,021 30	,408* ,025 30	,522** ,003 30	,627** ,000 30	,528** ,003 30	,788** ,000 30
X1_6 Pearson Correlati on	,333 ,368* ,588** ,379* ,420* 1	,368* ,588** ,379* ,420* 1	,588** ,379* ,420* 1	,379* ,420* 1	,420* 1	1 ,271 ,586** ,224 ,133 ,617**	,271 ,586** ,224 ,133 ,617**	,586** ,224 ,133 ,617**	,224 ,133 ,617**	,133 ,617**	,617**

	Sig. (2-tailed)	,072	,045	,001	,039	,021		,148	,001	,233	,485	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X1_7	Pearson Correlation	,267	,471**	,346	,600**	,408*	,271	1	,471**	,535**	,544**	,677**
	Sig. (2-tailed)	,153	,009	,061	,000	,025	,148		,009	,002	,002	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X1_8	Pearson Correlation	,413*	,457*	,591**	,605**	,522**	,586*	,471**	1	,413*	,439*	,766**
	Sig. (2-tailed)	,023	,011	,001	,000	,003	,001	,009		,023	,015	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X1_9	Pearson Correlation	,330	,413*	,434*	,668**	,627**	,224	,535**	,413*	1	,873**	,757**
	Sig. (2-tailed)	,075	,023	,016	,000	,000	,233	,002	,023		,000	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X1_10	Pearson Correlation	,327	,302	,339	,544**	,528**	,133	,544**	,439*	,873**	1	,688**
	Sig. (2-tailed)	,077	,105	,067	,002	,003	,485	,002	,015	,000		,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
total X1	Pearson Correlation	,592**	,747**	,758**	,824**	,788**	,617*	,677**	,766**	,757**	,688**	1
	Sig. (2-tailed)	,001	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	30	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,895	10

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X1_1	40,20	11,752	,492	,894
X1_2	40,30	11,183	,677	,882
X1_3	40,37	11,206	,693	,881
X1_4	40,23	10,875	,771	,876
X1_5	40,33	11,057	,728	,879
X1_6	40,30	11,252	,494	,897
X1_7	40,23	11,426	,592	,888
X1_8	40,30	11,114	,700	,881
X1_9	40,20	11,131	,688	,881
X1_10	40,13	11,430	,606	,887

B. Kejelasan Sasaran Anggaran**Correlations**

	X2_1	X2_2	X2_3	X2_4	X2_5	X2_6	totalX2
X2_1 Pearson Correlation	1	,391*	,230	,471*	,288	,540*	,651**
Sig. (2-tailed)		,033	,221	,009	,123	,002	,000

	N	30	30	30	30	30	30	30
X2_2	Pearson	,391*	1	,477*	,225	,417*	,451*	,648**
	Correlation							
	Sig. (2-tailed)	,033		,008	,231	,022	,012	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30
X2_3	Pearson	,230	,477*	1	,625*	,709*	,670*	,814**
	Correlation							
	Sig. (2-tailed)	,221	,008		,000	,000	,000	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30
X2_4	Pearson	,471*	,225	,625*	1	,537*	,622*	,782**
	Correlation							
	Sig. (2-tailed)	,009	,231	,000		,002	,000	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30
X2_5	Pearson	,288	,417*	,709*	,537*	1	,481*	,760**
	Correlation							
	Sig. (2-tailed)	,123	,022	,000	,002		,007	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30
X2_6	Pearson	,540*	,451*	,670*	,622*	,481*	1	,845**
	Correlation							
	Sig. (2-tailed)	,002	,012	,000	,000	,007		,000
	N	30	30	30	30	30	30	30
total	Pearson	,651*	,648*	,814*	,782*	,760*	,845*	1
X2	Correlation							
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	30	30	30	30	30	30	30

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	30	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,842	6

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X2_1	19,13	7,292	,504	,837
X2_2	19,17	7,247	,494	,840
X2_3	19,40	7,007	,739	,801
X2_4	19,33	6,437	,655	,809
X2_5	19,17	6,626	,630	,814
X2_6	19,13	5,982	,741	,790

C. Aktivitas Pengendalian

		X3_1	X3_2	X3_3	X3_4	X3_5	X3_6	X3_7	X3_8	totalX3
X3_1	Pearson Correlation	1	,389*	,261	,316	,603**	,279	,145	,120	,553**
	Sig. (2-tailed)		,033	,164	,089	,000	,135	,444	,527	,002
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X3_2	Pearson Correlation	,389*	1	,450*	,603**	,189	,109	,480**	,242	,662**
	Sig. (2-tailed)	,033		,013	,000	,318	,567	,007	,198	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X3_3	Pearson Correlation	,261	,450*	1	,431*	,297	,337	,478**	,220	,639**
	Sig. (2-tailed)	,164	,013		,018	,111	,069	,007	,243	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X3_4	Pearson Correlation	,316	,603**	,431*	1	,518**	,386*	,495**	,485**	,801**
	Sig. (2-tailed)	,089	,000	,018		,003	,035	,005	,007	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30

X3_5	Pearson Correlation	,603**	,189	,297	,518**	1	,628**	,328	,365*	,700**
	Sig. (2-tailed)	,000	,318	,111	,003		,000	,076	,047	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X3_6	Pearson Correlation	,279	,109	,337	,386*	,628**	1	,501**	,627**	,685**
	Sig. (2-tailed)	,135	,567	,069	,035	,000		,005	,000	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X3_7	Pearson Correlation	,145	,480**	,478**	,495**	,328	,501**	1	,542**	,730**
	Sig. (2-tailed)	,444	,007	,007	,005	,076	,005		,002	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X3_8	Pearson Correlation	,120	,242	,220	,485**	,365*	,627**	,542**	1	,668**
	Sig. (2-tailed)	,527	,198	,243	,007	,047	,000	,002		,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
totalX3	Pearson Correlation	,553**	,662**	,639**	,801**	,700**	,685**	,730**	,668**	1
	Sig. (2-tailed)	,002	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliability

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	30	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,832	8

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X3_1	28,57	8,875	,425	,828
X3_2	28,53	8,051	,519	,819
X3_3	28,33	8,368	,510	,819
X3_4	28,33	7,333	,698	,792
X3_5	28,47	8,257	,594	,808
X3_6	28,47	8,533	,591	,811
X3_7	28,40	8,179	,634	,804
X3_8	28,40	8,041	,529	,817

D. Akuntabilitas Kinerja

Correlations

	Y_1	Y_2	Y_3	Y_4	Y_5	Y_6	totalY
Y_1 Pearson Correlation	1	,390*	,466**	,400*	,531**	,354	,623**
Sig. (2-tailed)		,033	,010	,029	,003	,055	,000
N	30	30	30	30	30	30	30
Y_2 Pearson Correlation	,390*	1	,690**	,572**	,447*	,460*	,742**
Sig. (2-tailed)	,033		,000	,001	,013	,011	,000
N	30	30	30	30	30	30	30
Y_3 Pearson Correlation	,466**	,690**	1	,768**	,756**	,576**	,906**
Sig. (2-tailed)	,010	,000		,000	,000	,001	,000
N	30	30	30	30	30	30	30
Y_4 Pearson Correlation	,400*	,572**	,768**	1	,637**	,636**	,867**
Sig. (2-tailed)	,029	,001	,000		,000	,000	,000
N	30	30	30	30	30	30	30
Y_5 Pearson Correlation	,531**	,447*	,756**	,637**	1	,525**	,831**

	Sig. (2-tailed)	,003	,013	,000	,000		,003	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30
Y_6	Pearson	,354	,460*	,576**	,636**	,525**	1	,757**
	Correlation							
	Sig. (2-tailed)	,055	,011	,001	,000	,003		,000
	N	30	30	30	30	30	30	30
total	Pearson	,623**	,742**	,906**	,867**	,831**	,757**	1
Y	Correlation							
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	30	30	30	30	30	30	30

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	30	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,880	6

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Y_1	18,90	7,748	,517	,885
Y_2	19,17	6,971	,634	,868
Y_3	19,20	6,097	,853	,831
Y_4	19,23	5,840	,778	,844
Y_5	19,10	6,162	,731	,852
Y_6	18,90	6,714	,641	,867

X1_1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	N	3	7,9	7,9	7,9
	S	20	52,6	52,6	60,5
	SS	15	39,5	39,5	100,0
	Total	38	100,0	100,0	

X1_2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	7	18,4	18,4	18,4
	N	13	34,2	34,2	52,6
	S	16	42,1	42,1	94,7
	SS	2	5,3	5,3	100,0
	Total	38	100,0	100,0	

X1_3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	3	7,9	7,9	7,9
	N	12	31,6	31,6	39,5
	S	18	47,4	47,4	86,8
	SS	5	13,2	13,2	100,0
	Total	38	100,0	100,0	

X1_4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	N	16	42,1	42,1	42,1
	S	15	39,5	39,5	81,6
	SS	7	18,4	18,4	100,0
	Total	38	100,0	100,0	

X1_5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	N	12	31,6	31,6	31,6
	S	23	60,5	60,5	92,1
	SS	3	7,9	7,9	100,0
	Total	38	100,0	100,0	

X1_6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	7	18,4	18,4	18,4
	N	10	26,3	26,3	44,7
	S	16	42,1	42,1	86,8
	SS	5	13,2	13,2	100,0
	Total	38	100,0	100,0	

X1_7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	3	7,9	7,9	7,9
	N	8	21,1	21,1	28,9
	S	19	50,0	50,0	78,9
	SS	8	21,1	21,1	100,0
	Total	38	100,0	100,0	

X1_8

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	3	7,9	7,9	7,9
	N	8	21,1	21,1	28,9
	S	21	55,3	55,3	84,2
	SS	6	15,8	15,8	100,0
	Total	38	100,0	100,0	

X1_9

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid N	8	21,1	21,1	21,1
S	26	68,4	68,4	89,5
SS	4	10,5	10,5	100,0
Total	38	100,0	100,0	

X1_10

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid N	4	10,5	10,5	10,5
S	22	57,9	57,9	68,4
SS	12	31,6	31,6	100,0
Total	38	100,0	100,0	

totalx1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 24,00	1	2,6	2,6	2,6
25,00	2	5,3	5,3	7,9
30,00	1	2,6	2,6	10,5
31,00	1	2,6	2,6	13,2
32,00	4	10,5	10,5	23,7
33,00	1	2,6	2,6	26,3
34,00	3	7,9	7,9	34,2
35,00	1	2,6	2,6	36,8
36,00	2	5,3	5,3	42,1
38,00	2	5,3	5,3	47,4
40,00	5	13,2	13,2	60,5
42,00	5	13,2	13,2	73,7
43,00	3	7,9	7,9	81,6
44,00	1	2,6	2,6	84,2
45,00	3	7,9	7,9	92,1
46,00	2	5,3	5,3	97,4
50,00	1	2,6	2,6	100,0
Total	38	100,0	100,0	

X2_1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	N	3	7,9	7,9	7,9
	S	26	68,4	68,4	76,3
	SS	9	23,7	23,7	100,0
	Total	38	100,0	100,0	

X2_2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	1	2,6	2,6	2,6
	N	4	10,5	10,5	13,2
	S	25	65,8	65,8	78,9
	SS	8	21,1	21,1	100,0
	Total	38	100,0	100,0	

X2_3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	N	7	18,4	18,4	18,4
	S	29	76,3	76,3	94,7
	SS	2	5,3	5,3	100,0
	Total	38	100,0	100,0	

X2_4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	N	7	18,4	18,4	18,4
	S	25	65,8	65,8	84,2
	SS	6	15,8	15,8	100,0
	Total	38	100,0	100,0	

X2_5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	N	4	10,5	10,5	10,5
	S	26	68,4	68,4	78,9
	SS	8	21,1	21,1	100,0
	Total	38	100,0	100,0	

X2_6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	1	2,6	2,6	2,6
	N	7	18,4	18,4	21,1
	S	22	57,9	57,9	78,9
	SS	8	21,1	21,1	100,0
	Total	38	100,0	100,0	

totalx2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	18,00	1	2,6	2,6	2,6
	19,00	1	2,6	2,6	5,3
	20,00	2	5,3	5,3	10,5
	21,00	2	5,3	5,3	15,8
	22,00	3	7,9	7,9	23,7
	23,00	2	5,3	5,3	28,9
	24,00	10	26,3	26,3	55,3
	25,00	5	13,2	13,2	68,4
	26,00	7	18,4	18,4	86,8
	27,00	3	7,9	7,9	94,7
	28,00	1	2,6	2,6	97,4
	30,00	1	2,6	2,6	100,0
	Total	38	100,0	100,0	

X3_1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	2	5,3	5,3	5,3
	N	4	10,5	10,5	15,8
	S	27	71,1	71,1	86,8
	SS	5	13,2	13,2	100,0
	Total	38	100,0	100,0	

X3_2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	2	5,3	5,3	5,3
	N	11	28,9	28,9	34,2
	S	21	55,3	55,3	89,5
	SS	4	10,5	10,5	100,0
	Total	38	100,0	100,0	

X3_3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	N	14	36,8	36,8	36,8
	S	17	44,7	44,7	81,6
	SS	7	18,4	18,4	100,0
	Total	38	100,0	100,0	

X3_4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	N	11	28,9	28,9	28,9
	S	20	52,6	52,6	81,6
	SS	7	18,4	18,4	100,0
	Total	38	100,0	100,0	

X3_5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	1	2,6	2,6	2,6
	TS	1	2,6	2,6	5,3
	N	12	31,6	31,6	36,8
	S	20	52,6	52,6	89,5
	SS	4	10,5	10,5	100,0
	Total	38	100,0	100,0	

X3_6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	2	5,3	5,3	5,3
	N	9	23,7	23,7	28,9
	S	23	60,5	60,5	89,5
	SS	4	10,5	10,5	100,0
	Total	38	100,0	100,0	

X3_7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	N	12	31,6	31,6	31,6
	S	24	63,2	63,2	94,7
	SS	2	5,3	5,3	100,0
	Total	38	100,0	100,0	

X3_8

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	1	2,6	2,6	2,6
	N	14	36,8	36,8	39,5
	S	17	44,7	44,7	84,2
	SS	6	15,8	15,8	100,0
	Total	38	100,0	100,0	

totalx3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	20,00	1	2,6	2,6	2,6
	21,00	1	2,6	2,6	5,3
	24,00	1	2,6	2,6	7,9
	25,00	5	13,2	13,2	21,1
	26,00	5	13,2	13,2	34,2
	28,00	1	2,6	2,6	36,8
	31,00	2	5,3	5,3	42,1
	32,00	7	18,4	18,4	60,5
	33,00	6	15,8	15,8	76,3
	34,00	4	10,5	10,5	86,8
	35,00	3	7,9	7,9	94,7
	36,00	1	2,6	2,6	97,4
	40,00	1	2,6	2,6	100,0
	Total	38	100,0	100,0	

Y_1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	N	3	7,9	7,9	7,9
	S	30	78,9	78,9	86,8
	SS	5	13,2	13,2	100,0
	Total	38	100,0	100,0	

Y_2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	N	12	31,6	31,6	31,6
	S	24	63,2	63,2	94,7
	SS	2	5,3	5,3	100,0
	Total	38	100,0	100,0	

Y_3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	N	15	39,5	39,5	39,5
	S	19	50,0	50,0	89,5
	SS	4	10,5	10,5	100,0
	Total	38	100,0	100,0	

Y_4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	1	2,6	2,6	2,6
	N	15	39,5	39,5	42,1
	S	18	47,4	47,4	89,5
	SS	4	10,5	10,5	100,0
	Total	38	100,0	100,0	

Y_5

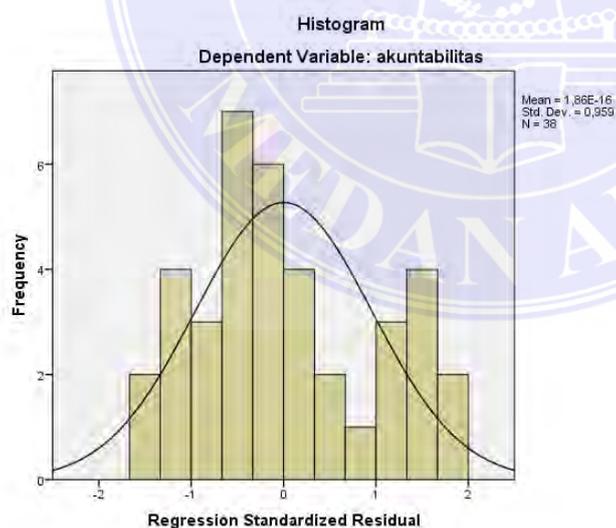
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	1	2,6	2,6	2,6
	N	11	28,9	28,9	31,6
	S	20	52,6	52,6	84,2
	SS	6	15,8	15,8	100,0
	Total	38	100,0	100,0	

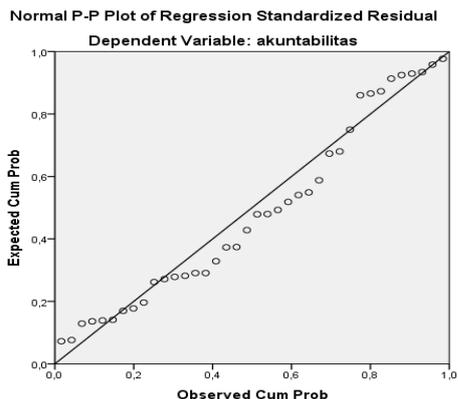
Y_6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	N	9	23,7	23,7	23,7
	S	21	55,3	55,3	78,9
	SS	8	21,1	21,1	100,0
	Total	38	100,0	100,0	

totally

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	18,00	2	5,3	5,3	5,3
	19,00	5	13,2	13,2	18,4
	20,00	4	10,5	10,5	28,9
	21,00	4	10,5	10,5	39,5
	23,00	1	2,6	2,6	42,1
	24,00	10	26,3	26,3	68,4
	25,00	4	10,5	10,5	78,9
	26,00	5	13,2	13,2	92,1
	27,00	2	5,3	5,3	97,4
	30,00	1	2,6	2,6	100,0
Total		38	100,0	100,0	





One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

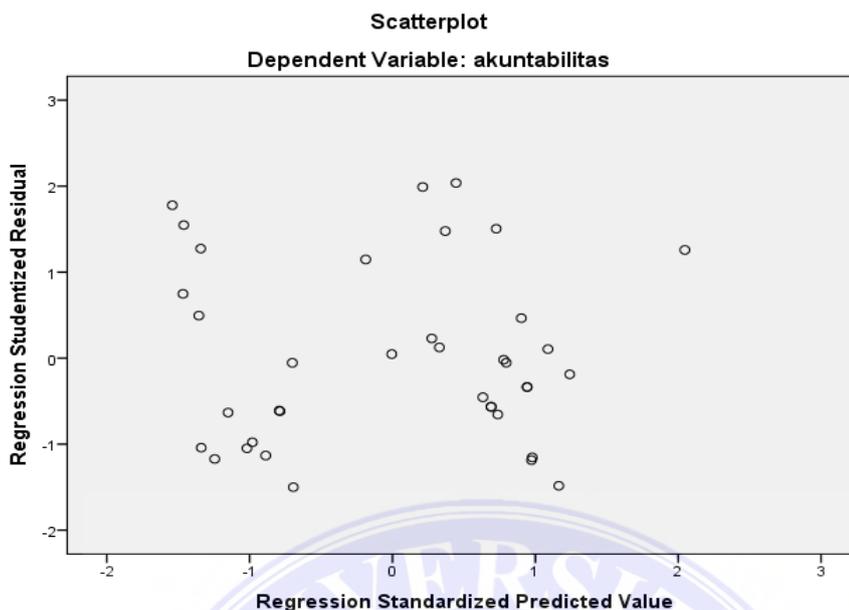
		Unstandardized Residual
N		38
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,37650792
Most Extreme Differences	Absolute	,112
	Positive	,112
	Negative	-,107
Test Statistic		,112
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	1,342	2,363		,568	,574		
	sistem keuangan	,172	,053	,366	3,265	,002	,491	2,036
	kejelasan	,234	,106	,197	2,206	,034	,773	1,294
	Aktivitas	,312	,078	,477	3,995	,000	,433	2,310

a. Dependent Variable: akuntabilitas



Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2,170	1,284		1,690	,100
	sistem keuangan	,005	,029	,043	,180	,858
	kejelasan	,001	,058	,005	,025	,980
	aktivitas	-,042	,042	-,253	-,994	,327

a. Dependent Variable: Abs_RES

Lampiran 4 : Hasil Uji Hipotesis

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,889 ^a	,790	,772	1,43595

a. Predictors: (Constant), aktivitas, kejelasan, sistem keuangan

b. Dependent Variable: akuntabilitas

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	263,788	3	87,929	42,644	,000 ^b
	Residual	70,107	34	2,062		
	Total	333,895	37			

a. Dependent Variable: akuntabilitas

b. Predictors: (Constant), aktivitas, kejelasan, sistem keuangan

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1,342	2,363		,568	,574
	sistem keuangan	,172	,053	,366	3,265	,002
	kejelasan	,234	,106	,197	2,206	,034
	aktivitas	,312	,078	,477	3,995	,000

a. Dependent Variable: akuntabilitas

Lampiran 5 : Surat Izin Riset



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Kampus I : Jl. Kolam No. 1 Medan Estate Telp (061) 7366878, 7360168, 7364348, 7366781, Fax. (061) 7366998
Kampus II : Jl. Sei Serayu No. 70A/Jl. Setia Budi No. 79B Medan Telp (061) 8225602, 8201994, Fax. (061) 8226331
Email : univ_medanarea@uma.ac.id Website:uma.ac.id/ekonomi.uma.ac.id email fakultas:ekonomi@uma.ac.id

05 Februari 2020

Nomor : 1030/FEB.2/01.10/II/2020
Lamp. :
Perihal : **izin Research / Survey**

Kepada, Yth, Pimpinan
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Medan Area di Medan, mengharapkan bantuan saudara kepada mahasiswa kami :

Nama : FADHILLAH RAMADHANI
N P M : 168330115
Program Studi : Akuntansi
Judul : Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara

Untuk diberi izin Research / survey di Instansi / Perusahaan yang Saudara pimpin. Hal ini dibutuhkan sehubungan dengan tugasnya menyusun Skripsi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Perguruan Tinggi dengan memenuhi ketentuan dan peraturan administrasi di Instansi / Perusahaan Bapak/Ibu

Dapat kami tambahkan bahwa Research / survey ini dipergunakan hanya untuk kepentingan ilmiah semata-mata. Kami mohon kiranya diberikan kemudahan dalam pengambilan data yang diperlukan, serta memberikan surat keterangan yang menyatakan telah selesai melakukan penelitian.

Demikian kami sampaikan atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.



Wakil Dekan Bidang Akademik
Fadhillah Ramadhani, SE, MM

Tembusan :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik
2. Kepala LPPM
3. Mahasiswa ybs
4. Pertinggal

